

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA



OPTIMALISASI DIPLOMASI TERHADAP *MELANESIAN SPEARHEAD GROUP (MSG)* GUNA Mendukung KEPENTINGAN NASIONAL

Oleh:

YULI CAHYANTI, S.S., M.Si.

KOMBES POL. NRP. 70070798

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA – XLVI)
LEMHANNAS RI
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb., Salam Sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala Rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan LXVI (PPRA-XLVI) telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: “Optimalisasi Diplomasi terhadap *Melanesian Spearheads Group* (MSG) Guna Mendukung Kepentingan Nasional Indonesia”.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Tutor Pembimbing Peserta PPRA LXVI Tahun 2024 Lemhannas RI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXVI di Lemhannas RI tahun 2024. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Mayjen TNI (Purn) Abdul Chasib dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuli Cahyanti, S.S., M.Si.

Pangkat : Kombes Pol

Jabatan : Analis Kebijakan Madya Bidang Misinter, Divisi Hubungan Internasional

Instansi : Polri

Alamat : Gedung TNCC Lantai 11 Mabes Polri, Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan LXVI (PPRA-LXVI) tahun 2024 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, Agustus 2024

Penulis



YULI CAHYANTI, S.S., M.SI.
KOMBES POL NRP 70070798

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Maksud dan Tujuan	6
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	6
5. Metode dan Pendekatan	7
6. Pengertian	8
BAB II LANDASAN PEMIKIRAN	10
7. Umum	10
8. Peraturan dan Perundang-undangan	11
9. Data/Fakta	12
10. Kerangka Teoritis	17
11. Lingkungan Strategis	21
BAB III PEMBAHASAN	28
12. Umum	28

13. Kondisi diplomasi Polri terhadap negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) guna mendukung kepentingan nasional Indonesia saat ini.....	29
14. Faktor-faktor yang mempengaruhi diplomasi Polri terhadap negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG).	45
15. Strategi Optimalisasi diplomasi Polri terhadap negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) guna mendukung kepentingan nasional Indonesia	53
16. Upaya Optimalisasi diplomasi Polri terhadap negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) guna mendukung kepentingan nasional Indonesia.....	63
BAB IV PENUTUP	74
17. Simpulan	74
18. Rekomendasi	75
DAFTAR PUSTAKA	77
DAFTAR LAMPIRAN:	
- ALUR PIKIR	



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan dalam keberagaman etnis dan ras, salah satunya adalah etnis Melanesia yang berjumlah hampir 11 juta jiwa. Mereka terutama menetap di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur¹. Papua Barat, sebagai salah satu provinsi strategis, menyimpan kekayaan alam yang berlimpah, seperti tambang emas dan berbagai mineral lain yang berperan dalam menyumbang ke APBN Indonesia. Meskipun demikian, proses internasionalisasi di wilayah ini menimbulkan tantangan terhadap kedaulatan NKRI, memicu kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan upayanya dalam mengamankan wilayah agar tidak terjadi pemisahan seperti kasus Timor Leste dalam sejarah bangsa². Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus memberikan perhatian tersendiri terhadap adanya rongrongan dari beberapa orang Papua yang ingin melepaskan diri dari negara kesatuan Indonesia tersebut. Hal ini tentunya harus disikapi dengan bijak dan tepat sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Fenomena adanya isu Papua merdeka dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi didalam negeri belakangan ini, misalnya, peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 Desember 2021, yang mana terdapat 8 (delapan) orang pemuda Papua melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora di GOR Cendrawasih dan melakukan *long march* menuju kantor DPRP Papua. Sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, mereka melakukan rapat persiapan yang artinya bahwa kegiatan ini telah direncanakan sebelumnya. Mereka membawa spanduk yang menyatakan agar Indonesia segera membuka akses bagi tim investigasi HAM PBB ke Papua Barat. Hal ini disampaikan oleh para pemuda tersebut sambil

¹ Muhammad Afif Maulana Roziqi. (2020). "Diplomasi Soft Power Indonesia dalam Melanesian Spearhead Group terhadap United Liberation Movement for West Papua". *Journal of International Relations, Volume 6, Nomor 2, 2020, hal 189;198.*

² Richard Chauvel *et.al*, *Indonesia-Australia: Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral* (Jakarta: Progran Pascasarjana FISIP UI, 2005), hlm.80-84.8.

menyanyikan lagu yang bersifat provokatif yang menyatakan bahwa bendera mereka adalah Bintang Kejora dan bukan Merah Putih.³

Selain itu, salah satu peristiwa yang menunjukkan adanya fenomena Papua Merdeka adalah saat pilot Susi Air, Philips M. Merthens, disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dari Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Pada pagi hari tanggal 7 Februari 2023, pesawat Susi Air dengan kode PK-BVY dan nomor penerbangan SI 9368 mengalami kecelakaan. Pilot pesawat tersebut kemudian disandera dan dijadikan tawanan agar pemerintah Indonesia berhenti mengejar kelompok penyandera pilot Susi Air dan mengancam akan membunuhnya jika kemerdekaan Papua tidak diakui.⁴ Sampai saat ini, pemerintah Indonesia yang bekerjasama dengan pemerintah Selandia Baru masih berupaya untuk dapat membebaskan pilot tersebut.

Peristiwa adanya isu OPM tidak hanya dilakukan di tanah Papua saja, melainkan juga diterjadi diluar Papua, salah satunya adalah di Jakarta dan Makasar. Pada tanggal 1 Desember 2023, lebih dari 70 orang Papua berkumpul di Jakarta, di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, untuk memperingati hari kemerdekaan orang Papua. Mereka melakukan barisan sambil membawa poster yang berisi kritik serta tuntutan untuk hak-hak orang Papua. Pada saat yang sama, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) bersama Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRIP-WP) juga melaksanakan aksi serupa di Makassar, menyerukan dukungan untuk kemerdekaan Papua.⁵

Dari beberapa peristiwa yang terjadi tersebut, maka dapat dipahami bahwa gerakan Papua merdeka masih mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia. Dan ternyata gerakan OPM ini mendapatkan dukungan dari luar negeri, terutama dari negara *anggota Melanesian Spearhead Group* (MSG) yang berada di wilayah samudera Pasifik dan merupakan ras yang sama dengan masyarakat Papua,

³ Jabbar Ramdhani (2021). Kibarkan Bendera Bintang Kejora di GOR Cenderawasih, 8 Orang Jadi Tersangka. melalui <https://news.detik.com/berita/d-5837515/kibarkan-bendera-bintang-kejora-gor-cenderawasih-8-orang-jadi-tersangka>, diakses 18 Februari 2024

⁴ Jonathan Simanjuntak (2023) Pilot Susi Air Disandera TPNPB – OPM, Dijadikan Jaminan Negosiasi Politik,. melalui <https://nasional.sindonews.com/read/1023187/14/pilot-susi-air-disandera-tpnpb-dijadikan-jaminan-negosiasi-politik-1676430162>, diakses 18 Februari 2024

⁵ CNN Indonesia (2023). Warga Papua Gelar Aksi 1 Desember di Jakarta dan Makassar. melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231201110526-12-1031466/warga-papua-gelar-aksi-1-desember-di-jakarta-dan-makassar>, diakses 18 Februari 2024.

yaitu ras Melanesoid. Sedangkan di luar Indonesia, ras ini menempati wilayah yang ada di Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Kaledonia Baru, Fiji, dan Vanuatu.⁶

Oleh karena itu, Indonesia telah menghadapi tantangan besar Melanesian Spearhead Group (MSG), yang terdiri dari beberapa negara di kawasan Pasifik, menjadi forum penting yang memengaruhi kepentingan strategis Indonesia di kawasan ini. Indonesia merupakan negara yang memiliki kepentingan strategis dalam menjaga stabilitas regional, terutama di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Dalam konteks ini, Melanesian Spearhead Group (MSG) muncul sebagai sebuah forum sub-regional yang penting, yang beranggotakan beberapa negara di kawasan Melanesia. Keanggotaan Indonesia sebagai negara pengamat dalam MSG membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara Melanesia. MSG didirikan dengan tujuan utama untuk memperkuat identitas dan solidaritas di antara negara-negara Melanesia. Namun, dalam perkembangannya, MSG juga menjadi platform untuk membahas isu-isu politik, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi kawasan tersebut. Bagi Indonesia, optimalisasi hubungan melalui diplomasi dalam MSG dapat memainkan peranan penting dalam mengamankan kepentingan nasionalnya, terutama berkaitan dengan isu separatisme di Papua.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki peran penting dalam konteks diplomasi nasional, terutama dalam mengamankan kepentingan Indonesia di kawasan Melanesia melalui Melanesian Spearhead Group (MSG). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri, Polri juga berperan dalam diplomasi kepolisian, yang melibatkan kerja sama lintas negara untuk mengatasi isu-isu keamanan yang bersifat transnasional. MSG, sebagai organisasi sub-regional di kawasan Pasifik, menjadi penting karena melibatkan beberapa negara yang memiliki keanekaragaman sosial, politik, dan keamanan yang tinggi. Dalam konteks ini, Polri dapat berkontribusi dalam memperkuat kerja sama regional, khususnya dalam mengatasi kejahatan lintas batas seperti

⁶ Putri Tiah (2022) Ras Melanesoid: Asal Usul, Ciri-ciri dan Contoh Sukunya. melalui <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6458819/ras-melanesoid-asal-usul-ciri-dan-contoh-sukunya#:~:text=Selain%20itu%2C%20peradaban%20dari%20bangsa.Papua%2C%20misalnya%20di%20Papua%20Nugini.,> diakses 19 Februari 2024

perdagangan narkoba, terorisme, dan kejahatan siber yang kerap menjadi tantangan bersama di kawasan ini.

Salah satu tantangan utama dalam diplomasi kepolisian adalah isu sensitivitas politik, khususnya berkaitan dengan isu Papua. Beberapa negara anggota MSG secara terbuka telah menyuarakan dukungan terhadap gerakan separatis di Papua, yang menuntut respons diplomasi yang cermat dan strategis dari Indonesia, termasuk dari Polri.

Upaya Polri dalam diplomasi kepolisian di MSG tidak hanya terfokus pada penanganan kejahatan, tetapi juga melibatkan penguatan kapasitas kepolisian negara-negara anggota. Program seperti pelatihan bersama, pertukaran informasi, dan bantuan teknis menjadi bagian dari upaya ini, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di kawasan.

Selain itu, Polri juga terlibat dalam dialog dan konferensi yang diselenggarakan di bawah naungan MSG, dimana mereka berperan sebagai perwakilan dalam diskusi yang berkaitan dengan keamanan regional. Keterlibatan ini membantu memperkuat hubungan interpersonal antara aparat penegak hukum di kawasan Melanesia, yang krusial untuk operasi keamanan bersama.

Dalam konteks penanganan isu Papua, Polri berupaya memperkuat diplomasi publik melalui kegiatan yang mendukung pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan Indonesia di Papua. Hal ini dilakukan melalui kerja sama dengan komunitas dan pemangku kepentingan di Papua dan negara-negara MSG untuk menunjukkan upaya Indonesia dalam pembangunan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Optimalisasi diplomasi Polri juga melihat pentingnya memanfaatkan teknologi dalam kerja sama kepolisian. Penggunaan teknologi informasi dalam pertukaran data intelijen dan pelacakan kejahatan transnasional adalah salah satu aspek yang terus dikembangkan dalam kerangka kerja sama dengan negara-negara MSG.

Polri juga berperan dalam mengadvokasi penerapan hukum internasional dan norma-norma keadilan dalam forum MSG. Melalui advokasi ini, Polri tidak hanya membantu mengamankan kepentingan nasional, tetapi juga memperkuat

posisi Indonesia sebagai pemain kunci yang mendukung stabilitas dan keamanan regional.

Tantangan yang dihadapi dalam proses ini tidak sedikit, termasuk perbedaan sistem hukum, kapasitas institusional, dan prioritas keamanan antar negara anggota MSG. Polri harus menavigasi perbedaan ini dengan diplomasi yang efektif, yang menghargai keberagaman dan mempromosikan solusi yang inklusif.

Peran Polri dalam diplomasi terhadap MSG adalah komponen kritical dalam mendukung kepentingan nasional Indonesia. Melalui pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai sektor kepolisian, serta kerja sama internasional yang efektif, Polri tidak hanya memperkuat keamanan nasional tetapi juga kontribusi Indonesia dalam stabilitas regional di kawasan Melanesia. Pendekatan ini memerlukan koordinasi yang erat dengan lembaga diplomatik lainnya dan strategi jangka panjang yang adaptif dan responsif terhadap dinamika kawasan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada gambaran sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan bahwa pokok masalah yang akan dibahas pada penulisan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) ini, adalah: **"Bagaimana melakukan optimalisasi diplomasi terhadap *Melanesian Spearhead Group (MSG)* guna dapat mendukung kepentingan nasional Indonesia?"**

Dalam rangka memberikan solusi atas permasalahan yang telah dijelaskan pada Rumusan Masalah tersebut, maka pertanyaan kajian yang akan dibahas lebih lanjut dalam Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kondisi Diplomasi Polri terhadap negara anggota *Melanesian Spearheads Group (MSG)* saat ini?
- b. Apa saja faktor yang dihadapi dalam Diplomasi Polri terhadap *Melanesian Spearhead Group (MSG)*?

c. Bagaimana Strategi Optimalisasi diplomasi Polri terhadap negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) guna mendukung kepentingan nasional Indonesia ?

d. Bagaimana upaya Optimalisasi Diplomasi terhadap negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) guna mendukung kepentingan nasional Indonesia?

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penulisan Taskap ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang diplomasi yang dilakukan terhadap negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG), dan faktor-faktor yang mempengaruhi, serta langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan sebagai upaya pemecahan masalah sehingga dapat mendukung kepentingan nasional Indonesia.

b. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Taskap ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada pihak terkait dalam rangka mengoptimalkan diplomasi dengan negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) guna mendukung kepentingan nasional Indonesia guna mendukung kepentingan nasional Indonesia.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan Taskap ini, dibatasi pada optimalisasi diplomasi Polri terhadap negara anggota MSG dengan mengedepankan peran Polri sebagai sub aktor diplomasi Indonesia untuk melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien serta komprehensif dalam mendukung kepentingan nasional Indonesia.

b. Sistematika

Sistematika penulis Taskap ini terbagi dalam 4 (empat) Bab dan beberapa sub bab yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Pada Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang optimalisasi diplomasi terhadap negara anggota MSG termasuk beberapa isu yang mempengaruhinya yang menjadi dasar dalam perumusan masalah serta maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika penulisan, metode dan pendekatan, yang diakhiri dengan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan optimalisasi diplomasi terhadap *Melanesian Spearhead Group* (MSG) guna dapat mendukung kepentingan nasional Indonesia.

Bab II : Landasan Pemikiran. Landasan pemikiran terdiri atas bagian umum sebagai pengantar, peraturan perundang-undangan, data/fakta, kerangka teoretis, serta lingkungan strategis yang mempengaruhi terhadap pertanyaan-pertanyaan kajian yang nantinya akan digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab pertanyaan kajian pada Taskap ini.

Bab III : Pembahasan. Bab ini merupakan inti pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan kajian yang dianalisis dengan data-data, peraturan perundang undangan serta teori yang digunakan untuk menghasilkan dan menemukan faktor penyebab permasalahan dan solusi serta langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.

Bab IV : Penutup. Pada Bab Keempat ini dibahas tentang simpulan dan rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan.

5. Metoda dan Pendekatan

a. Metoda

Penulisan Taskap ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif analitik, dimana semua data yang

diperoleh melalui hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil analisa dokumen, akan dideskripsikan dan dilakukan analisa sehingga dapat memberikan informasi yang menunjukkan hasil dari penelitian tersebut. Selanjutnya, hasil analisa data tersebut akan dituangkan dan disajikan dalam bentuk uraian naratif.⁷

b. Pendekatan

Sedangkan pendekatan yang digunakan pada penulisan Taskap ini adalah pendekatan komprehensif, holistik dan integral berdasarkan perspektif kepentingan nasional dan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan.

6. Pengertian

Dalam tulisan ini disampaikan beberapa pengertian terkait dengan judul, adalah:

- a. **Optimalisasi**, adalah berasal dari kata optimal yang menurut KBBI artinya adalah terbaik, tertinggi.⁸ Oleh karena itu, optimalisasi dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat sesuatu yang baik menjadi lebih atau paling baik dari sebelumnya, sehingga memberikan hasil yang maksimal.
- b. **Diplomasi**, menurut KBBI adalah urusan atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dengan negara yang lain.⁹
- c. **Melanesian Spearheads Group (MSG)**, adalah merupakan salah satu organisasi internasional yang berada di kawasan Pasifik dan dibentuk pada tahun 1988. Anggota MSG adalah Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan *Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS)*.
- d. **MSG Police Ministers Meeting (PMM)**, adalah forum pertemuan level Menteri yang membawahi kepolisian negara anggota MSG dan membahas tentang masalah keamanan dikawasan MSG.
- e. **MSG Police Commissioners Meeting (PCC)**, adalah forum pertemuan para kepala kepolisian negara anggota MSG yang membahas tentang keamanan dikawasan secara lebih teknis.

⁷ Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional (2008). Pendekatan, Jenis, dan Metode Penelitian Pendidikan. h.23

⁸ KBBI, melalui [Hasil Pencarian - KBBI VI Daring \(kemdikbud.go.id\)](https://kemdikbud.go.id) diakses 23 Maret 2024

⁹ Ibid.

- f. **MSG Regional Security Strategy Working Group (MSG RSS WG)**, adalah forum pertemuan para pejabat kepolisian yang lebih teknis dari MSG PCC.
- g. **Kepentingan nasional**, berdasarkan Doktrin Pertahanan Negara dimaknai sebagai suatu kondisi yang dapat menjaga NKRI untuk tetap melaksanakan pembangunan nasional dengan berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 sehingga dapat mewujudkan tujuan pembangunan dan sekaligus tujuan nasional.¹⁰



¹⁰ Peraturan Menteri Pertahanan RI No. 25 Tahun 2014 tentang Intelijen Negara.

BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

7. Umum

Diplomasi merupakan praktik mengelola hubungan internasional melalui perwakilan resmi antar negara atau pemerintah. Istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada interaksi antar negara dalam mencari solusi damai atas perbedaan, menegosiasikan perjanjian, dan mempromosikan kepentingan nasional dalam arena internasional. Diplomasi bertujuan untuk mempertahankan hubungan yang stabil dan menguntungkan antar negara dengan menghindari konflik terbuka dan memperkuat aliansi. Selain itu, diplomasi juga mencakup aktivitas-aktivitas seperti pertukaran budaya, pendidikan, dan misi-misi ekonomi, yang semuanya dapat mendukung upaya pembangunan hubungan jangka panjang dan saling menguntungkan. Dalam dunia modern, diplomasi juga mencakup isu-isu global seperti perubahan iklim, keamanan internasional, perdagangan global, dan hak asasi manusia.

Melanesian Spearhead Group (MSG) merupakan aliansi regional yang terdiri dari negara-negara di kawasan Melanesia di Pasifik Selatan. Organisasi ini bertujuan untuk memajukan perjanjian perdagangan yang lebih menguntungkan dan merangsang pertumbuhan ekonomi di antara anggotanya. Anggota dari MSG termasuk Republik Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu, serta Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), partai politik dari New Caledonia yang mendukung kemerdekaan dan didirikan pada tahun 1984. Dibentuk pada tanggal 17 Juli 1986 di Goroka, Papua Nugini, MSG memiliki tujuan untuk mendukung dekolonisasi dan mencapai kemerdekaan bagi negara-negara Melanesia, serta memperkuat identitas, hubungan budaya, politik, sosial, dan ekonomi di antara masyarakatnya.

Untuk menguraikan tentang optimalisasi diplomasi terhadap *Melanesian Spearhead Group* (MSG) diperlukan tinjauan pustaka sebagai referensi dalam pembahasan selanjutnya. Bab ini akan membahas berbagai peraturan perundang-undangan yang berperan sebagai dasar hukum bagi penyelenggara dalam

menjalankan tugas mereka, yang mungkin dapat menghambat atau menggagalkan kepentingan nasional Indonesia. Selain itu, bab ini juga akan mengeksplorasi beberapa teori yang menjadi landasan analisis terhadap permasalahan yang dibahas. Turut disampaikan juga data dan fakta yang memperkuat argumentasi tentang optimalisasi diplomasi terhadap *Melanesian Spearhead Group* (MSG) agar dapat mendukung kepentingan nasional Indonesia.

8. Peraturan dan Perundang-undangan

Beberapa instrumen peraturan dan perundang-undangan dapat dijadikan dasar pemikiran dalam pemecahan permasalahan yang dikemukakan disini, yaitu sebagai berikut:

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.

Undang-undang ini dibuat sebagai tindak lanjut dari Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang berlangsung dari pertengahan Juli hingga awal Agustus 1969. Undang-undang ini mengatur pembentukan provinsi dan kabupaten otonom di Irian Barat.

b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-undang (UU) ini mengatur tentang hubungan luar negeri. Pemerintah Indonesia dapat melakukan hubungan luar negeri dengan negara sahabat untuk menjaga kepentingan nasional Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sehingga hubungan luar negeri yang dibangun tersebut fokus dan terarah.

c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

UU ini menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan negara, pemerintah diizinkan untuk menjalin hubungan dan kerjasama internasional melalui pembuatan perjanjian internasional. Hal ini dapat dimaknai bahwa dalam

membangun dan menjalin hubungan kerjasama luar negeri yang bertujuan untuk menjamin kepentingan nasional dapat dilakukan dengan membentuk perjanjian internasional yang semua proses dan mekanismenya telah diatur oleh UU dan harus melalui Kementerian Luar Negeri RI sebagai penjurur hubungan internasional.

d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam UU ini mengatur tentang hubungan dan kerja sama Kepolisian dengan negara sahabat berdasarkan prinsip mengedepankan kepentingan nasional. Polri dalam melaksanakan mandat atau amanat UU ini mengacu pada UU No, 24 Tahun 2000, yaitu tentang Perjanjian Internasional.

9. Data/Fakta

Pada uraian Data dan Fakta ini akan disajikan beberapa informasi yang ada saat ini yang dapat dijadikan sebagai kerangka pemikiran dalam penyelesaian permasalahan yang diangkat pada Taskap, sebagai berikut:

a. Pemerintah Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik dan mempunyai kantor perwakilan dengan negara anggota MSG.

Perwakilan RI di negara anggota MSG ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memandang penting untuk melaksanakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan MSG. Kantor perwakilan yang sudah ada saat ini adalah:

- 1) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Port Moresby Papua Nugini merangkap Kepulauan Solomon.
- 2) KBRI di Canberra Australia merangkap Republik Vanuatu.
- 3) KBRI di Suva Republik Fiji merangkap Kiribati, Nauru dan Tuvalu.
- 4) Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Nourmea Kaledonia Baru (wilayah Seberang lautan Prancis).
- 5) Konsulat Republik Indonesia (KRI) di Vaimo Papua Nugini.

b. Kerja sama teknis yang dilakukan oleh Polri dengan negara anggota MSG yang sudah dibentuk melalui perjanjian internasional secara bilateral.

Sebagaimana yang telah disampaikan diatas, bahwa Polri telah membentuk dan mempunyai perjanjian internasional secara bilateral dengan negara anggota MSG. Hal ini tentunya dapat menjadi modal dasar untuk meningkatkan atau mengoptimalkan diplomasi dengan negara anggota MSG melalui kerjasama kepolisian yang sudah dibangun tersebut. Terdapat banyak program kegiatan yang dapat digunakan dan ditawarkan kepada negara anggota MSG tersebut karena secara kemampuan dan pengetahuan, Polri unggul dibandingkan dengan kepolisian negara anggota MSG. Bahkan beberapa negara tersebut secara terang terang menyampaikan permohonan bantuan pengembangan kapasitas personil kepolisiannya kepada Polri.

Perjanjian internasional *Police-to-Police* yang telah dibangun tersebut adalah sebagai berikut:

1) Papua Nugini

Dalam perjanjian ini Polri menandatangani sebuah Nota Kesepahaman untuk Kerja Sama dalam Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional serta Peningkatan Kapasitas, yang dilakukan pada tanggal 12 Mei 2015 di Port Moresby dan telah diperpanjang melalui penandatanganan Memorandum Saling Pengertian pada tanggal 5 Mei 2023 di Jakarta yang berlaku untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya. Dengan demikian, status perjanjian internasional tersebut masih berlaku saat ini.

2) Fiji

Dalam perjanjian ini Polri telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Pertahanan, Keamanan Nasional, dan Imigrasi Republik Fiji, yang berfokus pada kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas negara dan Peningkatan Kapasitas pada tanggal 23 November 2011 di Jakarta dan telah diperpanjang melalui penandatanganan Protokol Perpanjangan

Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada tanggal 9 November 2016 di Bali dan berlaku selama 3 (tiga) tahun melalui kesepakatan bersama secara tertulis Para Pihak. Dengan demikian, status perjanjian internasional tersebut harus diperpanjang lagi karena sudah habis masa berlakunya.

3) Vanuatu

Polri menandatangani sebuah Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Vanuatu yang berisi tentang kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas negara serta pengembangan kapasitas. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 23 April 2009 di Jakarta, memiliki masa berlaku tiga tahun dan dapat diperpanjang untuk tiga tahun lagi melalui kesepakatan bersama secara tertulis.

Sampai saat ini, perjanjian internasional tersebut belum diperpanjang karena komunikasi dengan pihak Vanuatu sempat terkendala. Dengan demikian status perjanjian internasional tersebut harus diperpanjang lagi untuk normalisasi situasi dan optimalisasi diplomasi terhadap negara anggota MSG.

4) Kepulauan Solomon

Polri sampai saat ini masih melakukan negosiasi pembahasan perjanjian internasional dengan Kepolisian Kepulauan Solomon. Pada tanggal 9 Juni 2022, pihak Kepulauan Solomon mengirimkan Nota Diplomatik ke Indonesia yang menyampaikan keinginan untuk membahas dan melakukan finalisasi terhadap perjanjian internasional yang berjudul *Memorandum of Understanding between The Indonesian National Police of the Republic Indonesia and the Ministry of Police, National Security, Correctional Services of Solomon Islands on Cooperation in Preventing and Combating Transnational Crimes and Capacity Building*. Saat ini, posisi perjanjian internasional tersebut masih proses negosiasi finalisasi dan rencana penandatanganan.

c. Kegiatan yang telah diikuti oleh Polri pada hubungan kerja sama secara multilateral dengan negara anggota MSG

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Polri adalah mengikuti beberapa pertemuan dengan MSG yang terkait dengan kerjasama kepolisian. Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai dasar informasi bahwa Polri mempunyai potensi untuk melakukan optimalisasi diplomasi dengan negara anggota MSG sehingga dapat mempengaruhi negara anggota MSG untuk menghormati kedaulatan Indonesia dan tidak mendukung OPM. Adapun kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Melanesian Spearhead Group (MSG) Inaugural Police Ministers Meeting (PMM) yang dilaksanakan pada tanggal 13-14 Desember 2016 di Nadi, Fiji

Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama para Menteri/Kepala Kepolisian negara-negara anggota MSG yang dipimpin oleh *Under Secretary of Police* Kepulauan Solomon (Ketua MSG 2015 – 2017). Pertemuan diikuti oleh Menhankam Fiji, Menteri Kepolisian Papua Nugini, Wakil Kepala Kepolisian Vanuatu dan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) serta Sekretariat MSG yang membahas isu-isu keamanan di kawasan dan tindak lanjut rencana pembentukan Akademi Kepolisian Regional MSG.

2) *The 2nd Melanesian Spearhead Group (MSG) Police Ministers Meeting* dan *7th Police Commissioners Conference (PCC)* yang dilaksanakan pada tanggal 13 – 16 Maret 2017 di Hotel Borobudur, Jakarta, Indonesia

Dalam rangka melaksanakan komitmen yang telah disampaikan Polri pada pertemuan *Melanesian Spearhead Group (MSG) Inaugural Police Ministers Meeting (PMM)* pada tanggal 13 – 14 Desember 2016 di Nadi, Fiji, maka Polri menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan 2 pertemuan sekaligus di Indonesia, yaitu pertemuan PMM ke 2 dan pertemuan *7th Police Commissioners Conference (PCC)* yang dilaksanakan pada tanggal 13 - 16 Maret 2017 di Hotel Borobudur,

Jakarta Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa Polri secara genuine ingin melakukan kerjasama dalam bidang kepolisian.

3) 1st Melanesian Spearhead Group (MSG) Regional Security Strategy (RSS) Working Group Meeting yang dilaksanakan pada tanggal 23 – 24 Oktober 2017 di Sheraton Hotel Bandung, Indonesia

Penyelenggaraan pertemuan pertama WG RSS ini merupakan salah satu implementasi dari komitmen yang telah disampaikan oleh Polri dalam mendukung negara anggota MSG. Pertemuan dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat dengan pertimbangan bahwa beberapa fasilitas Polri yang cukup baik ada disana. Fasilitas tersebut akan dijadikan tempat untuk dapat dikunjungi oleh para delegasi kepolisian negara anggota MSG. Fasilitas yang ada tersebut antara lain adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang menyelenggarakan pendidikan manajemen untuk membentuk calon pemimpin Polri mulai tingkat Pertama, Menengah dan Tinggi.

4) 2nd Regional Security Strategy Working Group Meeting yang dilaksanakan pada tanggal 26 – 27 Juli 2018 di Tanoa International Hotel, Nadi, Fiji.

Polri (Indonesia) terus secara aktif ikut berpartisipasi pada kegiatan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh MSG. Hal ini tentunya karena adanya kepentingan nasional yang harus dijaga dan dipertahankan melalui jalur kerjasama dan diplomasi yang dilakukan secara soft dan bertahap, sehingga menimbulkan kepercayaan negara anggota MSG kepada Indonesia (Polri).

5) 3rd Melanesian Spearhead Group (MSG) Regional Security Strategy (RSS) Working Group Meeting, yang dilaksanakan pada tanggal 15 -18 Juli 2019 di Tanoa International Hotel, Nadi, Fiji

Polri (Indonesia) tetap menunjukkan komitmennya sebagai *Full Member* WG RSS untuk mengawal dan melaksanakan mandat yang diberikan ke WG RSS kepada WG RSS. Pertemuan akhirnya menghasilkan draf final Regional Security Strategy yang rencananya

akan dilaporkan kepada PCC/PMM berikutnya untuk dipertimbangkan pengesahannya.

6) Penyerahan Kontribusi Kepolisian RI untuk Pengembangan *Melanesian Spearhead Group (MSG) Regional Security Strategy (RSS)* sejumlah USD 100.000, yang dilaksanakan secara simbolis pada tanggal 29 Maret 2022 di Sheraton Hotel, Jakarta

Sebagai perwujudan dari komitmen Polri untuk terus meningkatkan kerjasama dengan MSG, maka Polri melakukan penyerahan kontribusi sebesar USD 100.000 kepada MSG untuk mendukung MSG RSS WG.

7) *4th Melanesian Spearhead Group (MSG) Regional Security Strategy (RSS) Working Group Meeting*, yang dilaksanakan pada tanggal 23 – 27 Mei 2022 di Hotel Dynasty Resort, Bali Indonesia

Atas kepercayaan dari negara anggota MSG, Polri (Indonesia) kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan WG RSS ke-4 yang dilaksanakan di Bali, Indonesia.

8) *5th Melanesian Spearhead Group (MSG) Regional Security Strategy Working Group Meeting*, yang dilaksanakan pada tanggal 22 - 24 Mei 2023 di Hotel Peninsula International, Suva, Fiji

Pada pertemuan ini, Polri (Indonesia) hadir sebagai komitmen untuk berpartisipasi aktif dengan negara anggota MSG dalam WG RSS. Pertemuan akhirnya menghasilkan draf final Regional Security Strategy yang rencananya akan dilaporkan kepada PCC/PMM berikutnya untuk dipertimbangkan pengesahannya.

10. Kerangka Teoretis

a. Kerangka Teori

1) Teori Diplomasi

Hedley Bull, seorang professor studi hubungan internasional dari Australia, memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang diplomasi dalam karyanya, terutama melalui buku "*Anarchical Society:*

A Study of Order in World Politics". Diplomasi dijelaskan sebagai cara bagaimana negara dan entitas lainnya berinteraksi dalam politik global melalui perwakilan resmi mereka, menggunakan pendekatan yang damai (Aksoy, 2018)¹¹. Secara singkat diplomasi dapat diartikan sebagai seni melaksanakan berbagai macam hubungan antara para aktor politik global. Ada empat fungsi utama diplomasi menurut Bull. Pertama adalah untuk memfasilitasi komunikasi diplomatik antara berbagai entitas dalam politik global dan para pemimpin negara. Tanpa adanya komunikasi, baik komunitas internasional maupun sistem internasional tidak dapat berfungsi. Fungsi kedua adalah menegosiasikan perjanjian. Tanpa perjanjian-perjanjian antar aktor politik global, hubungan internasional akan diwarnai dengan banyak tindak kekerasan dan permusuhan antara para pihak yang terlibat. Fungsi diplomasi yang ketiga adalah mengumpulkan data intelijen dan informasi tentang negara lain, dan sebaliknya membatasi negara lain mendapatkan informasi mengenai negaranya sendiri. Namun demikian dalam situasi tertentu diplomasi bisa lebih menguntungkan apabila terjadi pertukaran informasi di antara para aktornya. Fungsi keempat adalah meminimalkan munculnya konflik dalam politik internasional, yang secara alami terdiri dari komunitas politik yang memiliki berbagai nilai, prasangka, sensitivitas yang berbeda-beda dan menjadi potensi sumber konflik. Para diplomat berfungsi untuk meredakan ketegangan dan sedapat mungkin menemukan penyelesaian.

2) **Teori *Soft Power***

Teori *Soft Power* dikemukakan oleh Joseph Nye, adalah kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi pihak lain dengan menggunakan daya tarik, bukan menggunakan penekanan atau pemaksaan. *Soft power* dapat timbul karena pesona yang dimiliki budaya, sistem nilai, dan kebijakan suatu negara.¹² *Soft power*

¹¹ Aksoy, M. (2018). "Redefining Diplomacy In The 21st Century & Examining The Characteristics Of An Ideal Diplomat". *Manas Journal of Social Studies*, Vol. 7 (3). H. 910.

¹² Nye, Joseph S. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs, h. x.

tergantung pada kemampuan negara tersebut untuk mendapatkan simpati dari negara lain, untuk membuat negara lain tertarik kepadanya. Oleh karena itu suatu negara harus memiliki modal yang bisa membuat negara lain tertarik untuk bisa melaksanakan soft power.¹³

Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara yang menikmati keberadaan institusi demokrasi yang kuat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan stabilitas politik yang dinamis. Menurut Amitav Acharya dalam bukunya berjudul *“Indonesian Matters: Asia Emerging Democratic Power”* demokrasi merupakan modal *soft power* Indonesia, yang membuatnya dipercaya oleh komunitas internasional untuk diajak bekerja sama (dikutip dari Yani dan Lusiana)¹⁴.

3) Teori Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional adalah aspek krusial dalam kebijakan luar negeri suatu negara, berfungsi sebagai pedoman untuk mencapai tujuan-tujuan nasional. Konsep ini sangat terkait dengan perspektif realisme dalam studi hubungan internasional, yang melihat keamanan sebagai tujuan utama suatu negara. Kebijakan luar negeri suatu negara mencerminkan kepentingan nasionalnya, yang menjadi alasan utama suatu negara terlibat dalam hubungan internasional dan bekerja sama dengan negara lain. Kepentingan nasional adalah kebutuhan dan keinginan yang ingin diraih suatu negara berdaulat dalam hubungannya dengan negara-negara berdaulat lainnya di dalam lingkungan pergaulan internasional.¹⁵

Hans J Morgenthau dalam bukunya *“Politics Among Nations”* menjelaskan bahwa kepentingan nasional secara esensial berhubungan dengan kekuasaan. Menurutnya, kepentingan nasional didefinisikan sebagai kapasitas minimal suatu negara untuk menjaga

¹³ Ibid., h. 5-6.

¹⁴ Yani, Y.M., Lusiana, E. (2018). “Soft Power dan Soft Diplomacy”. *Jurnal TAPIS*, Vol. 14 (2). H. 51.

¹⁵ Dermawan, Rifki. The National Interest Concept in a Globalised International System. *Indonesian Journal of International Relations* Vol 3 No. 2 (2019)

dan melindungi identitas politik, militer, dan budaya negara tersebut dari intervensi negara lain (Morgenthau, 1948).

Kepentingan nasional bukanlah tetap atau universal, tetapi dinamis dan tergantung pada konteks serta situasi geopolitik. Menurut Morgenthau, diplomasi adalah alat utama dalam politik internasional untuk mencapai kepentingan nasional melalui negosiasi dan pengaruh tanpa perang.

Berdasarkan teori Morgenthau, upaya yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan diplomasi terhadap *Melanesian Spearhead Group* (MSG) untuk memaksimalkan pengaruhnya pada *Melanesian Spearhead Group*, dalam rangka mendukung kepentingan nasional Indonesia, adalah sebagai berikut:

Pertama, penggunaan *soft power* dan *hard power*. Morgenthau mengakui pentingnya penggunaan berbagai instrumen kekuasaan. Indonesia dapat memadukan penggunaan *soft power* dan *hard power* dalam melakukan diplomasi dengan negara MSG, seperti diplomasi budaya, pendidikan, ekonomi, keamanan dan diplomasi lainnya untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan MSG.

Kedua, konsistensi dan ketegasan. Morgenthau menekankan pentingnya tindakan negara yang konsisten dengan kepentingan nasionalnya. Dalam konteks MSG, Indonesia harus jelas dan tegas terhadap kebijakan luar negerinya, menegaskan posisi dan batasan-batasan yang tidak dapat ditawar demi menjaga kedaulatan dan kepentingan nasionalnya.

Ketiga, kerja sama regional. Walaupun Morgenthau menekankan pada persaingan kekuasaan, dia juga mengakui pentingnya kerja sama untuk mengurangi ketegangan dan memperkuat stabilitas. Indonesia dapat memanfaatkan platform MSG untuk mempromosikan kerja sama di bidang yang memiliki kepentingan bersama, seperti keamanan, pendidikan, sosial budaya, perubahan iklim, pembangunan ekonomi dan lainnya.

11. Lingkungan Strategis

a. Global

Perkembangan strategis global dan regional dapat mempengaruhi kondisi geopolitik dan geostrategi suatu negara. Oleh karena itu, berdasarkan geopolitik yang berkembang saat ini, terdapat beberapa kondisi yang perlu mendapatkan perhatian khusus, misalnya perang antara Rusia dengan Ukraina yang sampai saat ini masih terus berlangsung, konflik antara Israel - Palestina di Gaza yang semakin meningkat meskipun saat ini PBB sudah mencoba untuk memainkan perannya dengan cara memfasilitasi gencatan senjata, rivalitas antara Tiongkok dan Amerika yang masih terasa kuat, krisis antara Tiongkok dan Taiwan yang semakin memanas, konflik di semenanjung Korea yaitu antara Korea Utara dan Korea Selatan, konflik terkait Laut China Selatan (LCS), dan beberapa isu lainnya.

Geopolitik yang diliputi suasana tegang dan memanas ini tentunya mempengaruhi kondisi nasional negara-negara didunia, tidak terkecuali Indonesia. Secara umum, Indonesia mencoba untuk merespon geopolitik global ini dengan baik demi menjaga kepentingan nasional. Indonesia dengan politik bebas aktifnya, memposisikan diri sebagai negara yang cinta perdamaian dari pada perang, cinta kemerdekaan, menjunjung tinggi kemanusiaan, dan ikut mendorong penyelesaian konflik dengan melakukan dialog dan pendekatan konstruktif serta ikut mendorong forum internasional untuk melakukan perannya sesuai mandat yang diberikan kepadanya.

Posisi Indonesia tersebut tentunya juga diterapkan dalam mengoptimalkan diplomasi terhadap negara anggota MSG yang saat ini sebagian dari mereka masih mempunyai pandangan negatif terhadap Indonesia dalam hal OPM, yaitu menganggap banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Papua. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu melakukan dialog dan kerjasama yang lebih erat dengan negara anggota MSG tersebut, sehingga mereka mengerti dan memahami langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama ini.

Apabila dilihat secara umum, lingkungan strategis global dan regional ini dapat mempengaruhi secara tidak langsung terhadap diplomasi Indonesia dalam meredam masalah OPM. Sebagai contoh dapat disampaikan bahwa posisi Amerika Serikat (AS) sebagai adi daya dunia yang sering mengkritisi negara-negara lain dalam hal penegakan hak asasi manusia. AS sedari awal berperan dalam proses penyatuan Irian atau Papua Barat ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tengah situasi Perang Dingin pada saat itu, AS memiliki kepentingan strategis dalam mendukung klaim Indonesia atas wilayah Papua yang dikuasai Belanda. Oleh karena itu AS mengusulkan rancangan kesepakatan yang akhirnya ditandatangani oleh Indonesia dan Belanda pada tanggal 15 Agustus 1962. Kepentingan strategis itu terutama adalah keberpihakan Indonesia pada AS dalam Perang Dingin dan akses kepada tambang emas di Pegunungan Jayawijaya yang kemudian dikelola oleh perusahaan AS, Freeport.¹⁶

Selama ini kebijakan AS menyikapi konflik yang timbul di Papua relatif konsisten dengan tidak mengkritisi masalah-masalah pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi sorotan beberapa pihak terutama para pegiat HAM. AS dipandang lebih mengutamakan hubungan baik dengan pihak pemerintah dan militer Indonesia, serta lebih mengakomodir kepentingan bisnis perusahaan-perusahaan AS yang memiliki kaitan dengan Papua dan Indonesia secara keseluruhan.¹⁷ Sikap AS yang demikian ini tidak sejalan dengan seruan dari beberapa anggota MSG yang bersimpati kepada OPM, dan mempermudah upaya diplomasi Indonesia terhadap MSG.

b. Regional

Aktor-aktor utama dalam lingkungan regional terdiri dari Republik Rakyat Tiongkok, negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN, dan Australia. Pengaruh Republik Rakyat Tiongkok semakin dominan dengan semakin kuatnya ekonomi dan militer negara itu yang

¹⁶ Ningsih, T.W., Rudiawan, B., Sianturi, D. (January 2023). "Analysis Of United States' Foreign Policy Towards Indonesia: From Freedom To Freeport In West Papua", *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, Vol. 36 No. 2. H. 500

¹⁷ McWilliams, E. (2017). *Time for a New US Approach toward Indonesia and West Papua*, dalam Webster, D., (Editor). *Flowers in the Wall: Truth and Reconciliation in Timor-Leste, Indonesia, and Melanesia*. Calgary, Alberta: University of Calgary Press. H. 261-267.

sekarang pada posisi nomor dua di dunia setelah AS. Posisi RRT yang demikian membuatnya secara langsung bersaing dan berhadapan dengan AS di tingkat global maupun di kawasan Asia Tenggara yang secara langsung bersentuhan dengan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan sendirinya berada di tengah perebutan pengaruh antara RRT dan AS. Selain itu, RRT juga berkepentingan menjaga Indonesia tetap sebagai mitra dagang penting dengan menjadi pasar dari produknya, menjadi sumber dari bahan baku mineral dan komoditas hasil bumi yang diperlukan RRT, dan sebagai tempat RRT menanamkan berbagai investasinya di bidang industri dan infrastruktur. Latar belakang seperti itu membuat RRT sampai dengan saat ini tidak menyuarakan kritikan ataupun celaan atas isu konflik di Papua, di samping memang RRT cenderung tidak tertarik pada isu-isu hak asasi manusia di negara lain.

Negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN merupakan tetangga-tetangga paling dekat Indonesia. Sebagai negara-negara tetangga yang saling berhubungan baik, selama ini mereka tidak pernah menyampaikan kritikan terhadap Indonesia dalam hal masalah Papua yang merupakan masalah dalam negeri Indonesia, dan sebaliknya Indonesia juga tidak pernah mencampuri urusan dalam negeri para tetangganya. Dalam kerangka ASEAN pun juga demikian karena salah satu prinsip ASEAN adalah tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggotanya.

Pada saat Indonesia sedang memperjuangkan penggabungan wilayah Papua (Irian Jaya) yang mana bersamaan dengan makin renggangnya hubungan Indonesia dengan blok Barat termasuk Inggris, Australia bersikap tidak mendukung perjuangan Indonesia tersebut dan lebih condong berpihak pada Belanda, apalagi ketika Indonesia kemudian melaksanakan "Konfrontasi" terhadap pembentukan negara Malaysia dan Singapura yang merupakan sesama anggota Negara Persemakmuran. Namun demikian sejak era Orde Baru ketika Indonesia lebih dekat dengan blok Barat, hubungan Indonesia dan Australia membaik, apalagi sejak peristiwa Bom

Bali di tahun 2002 membawa kedua negara semakin erat bekerja sama dalam hal keamanan yang ditandai dengan disepakatinya *Lombok Treaty* pada tahun 2006. Menyikapi isu Papua, sikap resmi paling keras pemerintah Australia adalah menyampaikan kritik dalam *Universal Periodic Review* Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa, namun Australia tidak pernah menyampaikan dukungan atau simpati kepada gerakan-gerakan kemerdekaan Papua. Hal ini dikarenakan Australia lebih mengutamakan kepentingan kerja sama keamanan dan ekonomi dengan Indonesia.¹⁸ Selain itu Australia sangat membutuhkan kedekatan dengan Indonesia untuk membendung pengaruh RRT di kawasan Asia-Pasifik dan memastikan agar Indonesia tidak lebih condong kepada RRT.¹⁹

Aktor-aktor lain di lingkungan regional adalah negara-negara berdaulat di kawasan Pasifik Barat, seperti Fiji, Vanuatu, Papua Niugini, dan Kepulauan Solomon, yang tergabung dalam *Melanesian Spearhead Group*.

c. Nasional

Aspek-aspek dalam lingkungan nasional yang terkait dengan isu Papua adalah:

1) Politik

Masalah klasik aspek politik dalam isu Papua adalah sejarah integrasi Papua ke dalam wilayah Republik Indonesia lewat pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat pada tahun 1969 yang meskipun hasilnya diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa namun bagi sebagian kalangan di Papua dipandang tidak transparan dan mengandung kecurangan terutama karena dilakukan lewat mekanisme perwakilan. Hal ini menghambat pembentukan nasionalisme keindonesiaan orang asli Papua.²⁰

¹⁸ Gao, X., Charlton, G.C. *Australia and New Zealand in the West Papua Conflict*. URL. <https://thediplomat.com/2023/04/australia-and-new-zealand-in-the-west-papua-conflict/>, diakses pada Sabtu, 29 Juni 2024.

¹⁹ Kingsbury, D. *Why you will never hear an Australian leader call out Indonesia on West Papua*. URL. <https://www.theguardian.com/australia-news/2023/sep/28/australia-west-papua-human-rights-abuse-allegations-indonesia>, diakses pada Sabtu, 29 Juni 2024.

²⁰ Perkasa, V.D. *Papua dan Ekonomi Politik yang Destruktif*, dalam Kompas.id, 10 Juli 2023, diakses pada 8 Juli 2024.

Aspek politik kedua adalah isu pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap orang asli Papua yang dilakukan oleh aparat TNI/Polri dalam upaya penegakan hukum dan keamanan di wilayah Papua. Pelanggaran HAM dan kekerasan menjadi cerita turun-temurun antar generasi dan menimbulkan perasaan dendam yang berkepanjangan terhadap Indonesia.²¹

Aspek politik berikutnya adalah perebutan jabatan dan kekuasaan dalam pemerintah daerah, baik yang bersifat kesukuan antar orang Papua sendiri maupun yang melibatkan kelompok kepentingan lain dari luar Papua. Gesekan antar kelompok seperti ini mengganggu jalannya pemerintahan dan menghambat pembangunan.²²

2) Ekonomi

Dalam aspek ekonomi, tanah Papua memberikan sumbangsih yang tidak sedikit bagi Indonesia lewat kekayaan sumber daya alamnya yang dieksploitasi dan mendatangkan pendapatan bagi pemerintah, terutama tambang emas dan tembaga Freeport. Namun demikian hasil yang kembali untuk masyarakat Papua dipandang tidak seimbang sehingga pemerintah pusat dianggap hanya ingin mengeruk kekayaan bumi Papua dan menimbulkan pandangan negatif di kalangan orang asli Papua.

Selain masalah pertambangan seperti Freeport, investasi swasta dari luar Papua makin banyak yang masuk terutama di bidang perhutanan dan perkebunan terutama kelapa sawit. Tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa contoh bahwa investasi dari luar menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat karena menyerobot tanah atau hutan adat.²³

Masalah ekonomi yang lain adalah banyaknya pendatang dari luar Papua untuk bekerja dan berusaha di Papua, misalkan dengan menjadi

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Sucahyo, N. *Sawit di Papua: Tarik Menarik antara Masyarakat Adat dan Pemerintah*, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/sawit-di-papua-tarik-menarik-antara-masyarakat-adat-dan-pemerintah/7182818.html>, diakses pada 8 Juli 2024.

pedagang. Para pendatang ini berasal dari kelas menengah ke bawah yang datang ke Papua untuk memperbaiki taraf hidupnya dan seringkali lebih berhasil daripada orang asli Papua karena memperoleh tingkat pendidikan yang lebih baik di daerah asal serta lebih ulet sebagai pendatang. Namun demikian keberhasilan para pendatang secara ekonomi menimbulkan kecemburuan di kalangan masyarakat asli Papua. Sementara itu ada pandangan di kalangan masyarakat di luar Papua bahwa dengan kebijakan otonomi khusus sebenarnya pemerintah tidak adil dan terlalu memanjakan orang Papua.²⁴

3) Pertahanan Keamanan

Selama tahun 2023 Polri mencatat terjadi 199 aksi yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua yang terdiri dari 40 kali penembakan dan 23 kali kontak tembak dengan aparat TNI/Polri yang mengakibatkan 64 korban jiwa dan 81 korban luka, serta 136 aksi lainnya seperti pembakaran sekolah, puskesmas, dan penyanderaan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mark Mehrtens²⁵. Sementara itu, sebanyak 19 orang KKB dilumpuhkan dan terhadap 124 orang KKB dilakukan proses penegakan hukum²⁶.

Melihat data di atas, KKB secara aktif beraksi untuk menimbulkan gangguan keamanan dan mengganggu kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah sehingga dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah gagal memenuhi amanatnya membangun Papua sebagaimana tercantum dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 2504 (XXIV): "...Noting that the Government of Indonesia, in implementing its national development plan, is giving special attention to the progress of West Irian, bearing in mind the specific conditions of its population,...". Selain itu KKB memiliki cita-cita memerdekakan wilayah Papua dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²⁴ Perkasa, V.D. *Op.cit.*

²⁵ Kantor Berita Antara. *Penanganan Gangguan KKB di Papua*, dalam <https://www.antaraneews.com/infografik/3899166/penanganan-gangguan-kkb-di-papua>, diakses pada 10 Juli 2024.

²⁶ Firmansyah, H. *Perpanjang Operasi Damai Cartenz di Papua, Polri Diapresiasi*, dalam <https://www.rri.co.id/nasional/515285/perpanjang-operasi-damai-cartenz-di-papua-polri-diapresiasi>, diakses pada 10 Juli 2024.

Menghadapi gangguan KKB, pemerintah mengerahkan Polri dan TNI melakukan operasi gabungan yang semula dinamakan Operasi Nemangkawi dan sejak Januari 2022 diubah menjadi Operasi Damai Cartenz. Operasi ini berfokus pada upaya mengedepankan tindakan preventif dan persuasif yang didukung upaya penegakan hukum. Pendekatannya akan mengutamakan tiga fungsi, yakni fungsi intelijen, fungsi pembinaan masyarakat, dan fungsi hubungan masyarakat. Pendekatan baru ini mengedepankan aspek kesejahteraan masyarakat setempat agar tidak ada lagi korban kekerasan di Papua²⁷.



²⁷ CNN Indonesia. *Beda Pendekatan Operasi Damai Cartenz dan Satgas Nemangkawi di Papua*, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220111104315-12-745089/beda-pendekatan-operasi-damai-cartenz-dan-satgas-nemangkawi-di-papua>, diakses pada 10 Juli 2024.

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap MSG sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya pencapaian status Indonesia sebagai *Observer* terhadap *Melanesian Spearhead Group* (MSG) pada KTT MSG ke-18 di Fiji tahun 2011 dan kemudian meningkat menjadi *Associate Member* MSG pada KTT MSG ke-20 di Honiara Kepulauan Solomon.²⁸ Diterimanya Indonesia dengan status *Associate Member* ini, merupakan salah satu pintu masuk bagi Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan negara anggota MSG guna menjamin kepentingan nasional.

Sementara itu di sisi lain, *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) terus berupaya untuk memperoleh status sebagai anggota penuh MSG. Namun, pada KTT MSG ke-22 yang dilaksanakan pada tanggal 23 – 24 Agustus 2023 diputuskan bahwa MSG menolak permintaan keanggotaan penuh ULMWP. Keputusan ini tentunya membuat rasa kecewa para pemimpin ULMWP dan pendukungnya.²⁹ Namun demikian, Indonesia harus mampu meredam upaya-upaya yang dilakukan ULMWP yang terus mempengaruhi negara anggota MSG untuk mencari dukungan dan simpati serta mengakui keberadaan ULMWP.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini merespon dengan cara yang elegan, yaitu dengan mengedepankan diplomasi. Diplomasi ini dimaksudkan agar Indonesia dapat mempengaruhi negara anggota MSG secara halus untuk menghormati kedaulatan Indonesia dan tidak terpengaruh dengan ULMWP yang terus berupaya untuk mencari dukungan diluar negeri. Hal ini mendorong Indonesia untuk melakukan optimalisasi diplomasi terhadap MSG sehingga pemerintah Indonesia dapat fokus dalam melaksanakan kebijakan dalam

²⁸ Kemlu RI, Status Indonesia di MSG dibarengi dengan Kerjasama Konkrit, melalui <https://www.tabloiddiplomasi.org/status-indonesia-di-msg-dibarengi-dengan-kerjasama-konkrit/>, diakses pada tanggal 29 Juni 2024.

²⁹ Hamid, U. *Isu Papua dalam Dinamika Pasifik*, melalui <https://mediaindonesia.com/opini/608975/isu-papua-dalam-dinamika-pasifik>, diakses pada 29 Juni 2024.

membangun Papua dengan baik tanpa ada gangguan dari dunia internasional. Sebab Papua sudah final merupakan bagian NKRI sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 sebagai tindak lanjut dari hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang dilaksanakan pada pertengahan bulan Juli sampai awal Agustus 1969, sehingga Peran Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Papua sangat penting dalam konteks keseluruhan keamanan nasional Indonesia.

13. Kondisi diplomasi Polri terhadap negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) guna mendukung kepentingan nasional Indonesia saat ini.

Diplomasi Polri (Kepolisian Republik Indonesia) terhadap negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) mencakup berbagai strategi dan kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral, meningkatkan keamanan regional, dan mendukung kebijakan luar negeri Indonesia. MSG terdiri dari negara-negara Melanesia di Pasifik, termasuk Papua Nugini, Fiji, Vanuatu, dan Kepulauan Solomon, dengan tujuan utama kerjasama politik dan ekonomi serta promosi kepentingan Melanesia. Adapun tujuan utama dari diplomasi Polri adalah untuk memperkuat stabilitas dan keamanan di kawasan Melanesia, mendukung kebijakan luar negeri Indonesia, dan membangun kapasitas negara-negara anggota MSG dalam mengelola tantangan keamanan mereka sendiri. Diplomasi ini juga bertujuan untuk menangani isu-isu seperti pengaruh asing di kawasan, isu-isu teritorial, dan mendukung integrasi regional yang lebih luas. Melalui pendekatan ini, Polri tidak hanya membantu menjaga keamanan nasional tetapi juga memperkuat hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan Pasifik.

Diplomasi sebagaimana dikemukakan oleh Hedley Bull adalah sarana penting dalam menjaga tatanan internasional dan menghindari konflik melalui negosiasi dan komunikasi antarnegara. Bull berpendapat bahwa diplomasi membantu dalam pemeliharaan kestabilan dan keamanan internasional melalui dialog yang berkelanjutan. Dalam konteks MSG, Polri mungkin terlibat dalam diplomasi yang berkaitan dengan isu keamanan dan penegakan hukum yang bisa

mempengaruhi stabilitas regional. Kegiatan ini Polri bisa berpartisipasi dalam inisiatif keamanan regional, seperti pertukaran informasi intelijen, pelatihan bersama, dan operasi pencegahan kejahatan transnasional. Mengingat bahwa Papua adalah bagian dari Melanesia, Polri mungkin terlibat dalam diplomasi untuk menjelaskan posisi dan kebijakan Indonesia terhadap Papua, mengantisipasi dukungan atau penentangan dari negara-negara MSG.

Peran Polri terlibat dalam diplomasi juga berpegang pada UU RI No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, menetapkan kerangka bagi Indonesia dalam menjalankan hubungan luar negerinya, termasuk mempromosikan kepentingan nasionalnya, menjaga kedaulatan dan integritas teritorial, serta berkontribusi pada perdamaian dan keamanan internasional. UU ini menggariskan bahwa setiap kegiatan internasional harus dilakukan dengan menghormati hukum internasional dan berdasarkan prinsip saling menghormati kedaulatan.

Oleh karena itu, dalam konteks Bull, diplomasi yang dilakukan oleh Polri harus bertujuan untuk memperkuat tatanan regional dan mengurangi kemungkinan konflik. Dengan mengikuti UU RI No. 37 Tahun 1999, kegiatan tersebut harus mempromosikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas, sambil menjaga kepentingan nasional Indonesia. Ini berarti bahwa Polri perlu bertindak dengan cara yang transparan, bertanggung jawab, dan dalam kerangka kerja sama internasional. Melalui diplomasi yang efektif, Polri dapat membantu memastikan bahwa Indonesia berperan aktif dalam menangani isu regional dan menjalin kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara Melanesia, sejalan dengan teori Hedley Bull tentang pemeliharaan tatanan internasional dan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU Hubungan Luar Negeri.

Saat ini, kondisi diplomasi Polri terhadap Melanesian Spearhead Group (MSG) terfokus pada meningkatkan kerjasama keamanan dan penegakan hukum dengan negara-negara anggota MSG. Inisiatif ini meliputi pertukaran informasi intelijen, pelatihan bersama, dan operasi keamanan yang koordinatif, yang semuanya bertujuan untuk menangani isu-isu transnasional seperti terorisme, penyelundupan narkoba, dan kejahatan siber. Melalui aktivitas ini, Polri berusaha memperkuat hubungan dengan lembaga keamanan negara-negara MSG, yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas respons regional terhadap

ancaman keamanan yang mungkin berdampak pada Indonesia dan negara-negara tetangga di Pasifik.

Di samping itu, diplomasi Polri juga mencakup upaya membangun pemahaman dan kepercayaan yang lebih baik antara Indonesia dan negara-negara MSG mengenai isu sensitif, terutama terkait dengan situasi di Papua. Upaya diplomasi ini dilakukan melalui dialog dan komunikasi yang terbuka untuk menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia dalam mempromosikan pembangunan dan kesejahteraan di Papua, sekaligus mengurangi potensi dukungan terhadap gerakan separatisme. Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan lembaga terkait lainnya terus diperkuat untuk memastikan bahwa semua aktivitas diplomasi Polri berjalan sinergis dan mendukung kebijakan luar negeri Indonesia secara keseluruhan.

Polri, sebagai bagian dari pemerintah Indonesia, dapat terlibat dalam diplomasi bilateral dan multilateral, termasuk dalam forum-forum regional seperti MSG. Dalam kerangka kerja MSG, Polri berupaya memperkuat kerjasama kepolisian regional untuk mengatasi masalah keamanan transnasional yang umum di kawasan ini, seperti perdagangan narkoba, terorisme, dan kejahatan siber. Pendekatan ini diarahkan untuk menciptakan stabilitas regional yang pada akhirnya mendukung kepentingan nasional Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Kerjasama dalam bentuk latihan bersama, pertukaran informasi intelijen, dan operasi keamanan yang koordinatif merupakan bagian dari strategi diplomasi Polri. Aktivitas-aktivitas ini bertujuan untuk membangun kapasitas kepolisian di negara-negara anggota MSG dan meningkatkan keefektifan mereka dalam menangani isu-isu keamanan yang juga berpengaruh terhadap keamanan nasional Indonesia. Polri juga berupaya memperkuat hubungan melalui inisiatif-inisiatif seperti pertemuan tahunan, workshop, dan seminar yang membahas tantangan keamanan bersama.

Dalam melaksanakan diplomasi ini, Polri harus memastikan bahwa semua aktivitasnya selaras dengan kebijakan luar negeri yang ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri, sebagai koordinator utama hubungan internasional Indonesia. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan diplomasi

Polri tidak hanya efektif tetapi juga konsisten dengan arah dan strategi hubungan luar negeri Indonesia secara keseluruhan. Melalui pendekatan yang terkoordinasi ini, diplomasi Polri terhadap MSG diharapkan dapat terus menguatkan posisi Indonesia di kawasan Pasifik, sekaligus mendukung stabilitas dan keamanan regional.

Namun demikian dalam diplomasi Polri terhadap Melanesian Spearhead Group (MSG) saat ini menghadapi beberapa permasalahan, antara lain:

a. Persepsi Negatif terhadap Indonesia.

Permasalahan persepsi negatif terhadap Indonesia dalam konteks diplomasi Polri terhadap Melanesian Spearhead Group (MSG) memiliki beberapa dimensi yang kritis dan kompleks. Salah satu sumber utama persepsi negatif ini adalah isu-isu hak asasi manusia di Papua, yang sering kali menjadi sorotan internasional. Negara-negara anggota MSG, yang memiliki hubungan etnis dan budaya dekat dengan masyarakat Papua, secara khusus sensitif terhadap laporan-laporan mengenai tindakan kekerasan atau penindasan. Hal ini sering kali mempersulit usaha Indonesia untuk membangun hubungan yang kuat dan produktif, karena dihadapkan pada tantangan untuk menjelaskan dan menyeimbangkan kebijakan domestiknya dengan harapan dan nilai yang dipegang oleh negara-negara MSG.

Selanjutnya, media dan propaganda yang beragam sumbernya dapat mempengaruhi dan terkadang memperburuk persepsi negatif tersebut. Media internasional dan kelompok advokasi seringkali memberikan gambaran yang tidak lengkap atau satu sisi, yang cenderung menggambarkan situasi di Papua sebagai krisis hak asasi manusia yang berkelanjutan. Hal ini menantang karena mempengaruhi opini publik dan para pembuat kebijakan di negara-negara MSG, yang pada gilirannya mempengaruhi dinamika diplomasi bilateral dan multilateral. Polri, dalam perannya yang juga melibatkan kegiatan diplomasi, harus bekerja ekstra dalam komunikasi dan diplomasi publik untuk meluruskan kesalahpahaman dan membangun narasi yang lebih seimbang.

Melihat gelagat propaganda media internasional yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat makin aktif bergerak di kawasan Pasifik terutama di kalangan negara-negara MSG dan juga dukungan dari mereka terutama Vanuatu, Indonesia memilih jalan diplomasi dengan bergabung ke dalam MSG dengan mengajukan permohonan keanggotaan pada 2010 dan diterima dengan status *observer* pada 2011. Indonesia akhirnya mendapatkan peningkatan status menjadi *associate member* pada 2015 saat pertemuan MSG yang sama di mana ULMWP mendapatkan status *observer*. Selain itu MSG memutuskan bahwa perwakilan-perwakilan dari lima provinsi di Papua akan mewakili Indonesia dan rakyat Papua di forum MSG, sementara ULMWP hanya mewakili orang Papua yang tinggal di luar Papua³⁰.

Mengatasi tantangan ini membutuhkan pendekatan multidimensi oleh Polri dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Diperlukan upaya yang intensif untuk mengadakan dialog yang konstruktif dan transparan dengan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan komunitas lokal di negara-negara MSG. Juga penting untuk melibatkan aktor-aktor non-pemerintah, seperti LSM dan kelompok masyarakat sipil, dalam pembicaraan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan. Selain itu, program pertukaran budaya, pendidikan, dan pelatihan bersama bisa menjadi alat yang efektif untuk mempererat hubungan dan memperbaiki citra Indonesia di mata dunia, khususnya negara-negara anggota MSG.

b. Konflik Internal di Papua.

Konflik internal di Papua merupakan tantangan signifikan bagi diplomasi Polri terhadap Melanesian Spearhead Group (MSG) karena berbagai alasan.

- 1) Kekerasan dan ketidakstabilan yang berkelanjutan di Papua sering dilihat sebagai refleksi dari kegagalan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani aspirasi dan hak-hak masyarakat Papua.

³⁰ ABC News. *Indonesia admitted to Melanesian Spearhead Group, West Papuan group given observer status*, dalam <https://www.abc.net.au/news/2015-06-25/indonesia-admitted-to-melanesian-intergovernmental-group/6573968>, diakses pada 13 Juli 2024.

Ini mempengaruhi persepsi negara-negara MSG, yang banyak di antaranya memiliki hubungan etnis dan historis dengan masyarakat Papua. Ketika konflik ini terus berlanjut, negara-negara anggota MSG mungkin merasa ada kewajiban moral atau etnis untuk menanggapi atau bahkan mendukung kelompok-kelompok pro-kemerdekaan di Papua, yang dapat mengkomplikasi hubungan diplomatik.

2) Konflik di Papua sering kali mendapat sorotan dari organisasi internasional dan media global yang menciptakan tekanan internasional terhadap Indonesia. Tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan represif oleh aparat keamanan Indonesia dapat mengakibatkan kampanye negatif yang mempengaruhi citra Indonesia secara keseluruhan. Ini dapat menantang Polri dan diplomasi Indonesia dalam mempromosikan narasi alternatif atau menjelaskan konteks lokal yang lebih kompleks kepada audiens global, termasuk negara-negara MSG. Hal ini memerlukan upaya komunikasi yang cermat dan diplomasi publik yang terstruktur untuk mengurangi kesenjangan persepsi.

3) Respons terhadap konflik ini oleh Polri dan lembaga pemerintah lainnya harus memperlihatkan komitmen yang jelas terhadap prinsip-prinsip penegakan hukum dan hak asasi manusia yang kuat. Tantangan ini tidak hanya soal menanggapi kekerasan, tapi juga tentang bagaimana kebijakan dan tindakan di Papua dapat diinterpretasikan sebagai simbol dari pendekatan Indonesia terhadap minoritas dan kelompok rentan secara lebih luas. Diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan dialog inklusif dengan masyarakat setempat, mempromosikan pembangunan sosial dan ekonomi, dan mengatasi akar masalah ketidakpuasan.

c. Pengaruh Negara Lain.

Pengaruh negara lain menjadi permasalahan dalam diplomasi Polri terhadap negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) karena beberapa alasan. Kawasan Pasifik Barat Daya di mana negara-negara anggota MSG berada sejak lama berada di bawah pengaruh

Australia dan Selandia Baru. Dewasa ini China yang makin berkembang menjadi kekuatan global menyaingi AS berusaha untuk memperluas pengaruhnya di kawasan ini. Bahkan sebagai contoh nyata gedung sekretariat MSG di Port Vila, Vanuatu, dibangun dan disumbangkan oleh China. Sekretariat MSG dan China memulai pembicaraan untuk menjalin kemitraan di berbagai bidang pada Desember 2020, dan semua anggota MSG sudah menerapkan “*One China Policy*”, yang berarti mereka hanya mengakui China sebagai satu-satunya negara China³¹. China juga mulai melakukan pendekatan di bidang kepolisian melalui pemberian material dan pelatihan kepada kepolisian negara-negara MSG³². Bahkan AS dan sekutunya menuduh China secara diam-diam berupaya untuk menghadirkan militernya secara permanen di kawasan Pasifik Barat Daya³³.

Hal ini jelas bahwa negara-negara besar seperti Australia, Amerika Serikat, dan China memiliki kepentingan strategis yang kuat di kawasan Pasifik, termasuk dalam isu-isu yang mempengaruhi MSG. Pengaruh mereka dapat mempengaruhi kebijakan dan sikap negara-negara MSG terhadap Indonesia, terkadang mendukung tetapi sering kali juga menantang posisi Indonesia. Misal Vanuatu sebagai negara anggota MSG yang paling tidak sampai Sidang Majelis Umum PBB tahun 2021 masih menyuarakan adanya pelanggaran HAM di Papua, diharapkan menghormati kedaulatan Indonesia dan tidak lagi melakukan aksi menyuarakan tuduhan bahwa pemerintah Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua yang disampaikan di forum internasional. Hal ini menjadi nyata di Sidang Majelis Umum tahun 2023 di mana tidak ada satu negara pun yang mengangkat isu Papua³⁴. Bahkan sekalipun Vanuatu sering merugikan Indonesia lewat kritiknya di forum

³¹ Website MSG Secretariat. *MSG Secretariat and People's Republic of China discusses possible partnership arrangement*, dalam <https://msgsec.info/msg-secretariat-and-peoples-republic-of-china-discusses-possible-partnership-arrangement/>, diakses pada 13 Juli 2024.

³² Peake, G. dan Graeme S. *Solomon Islands: cops bearing gifts*, dalam <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/solomon-islands-cops-bearing-gifts>, diakses pada 13 Juli 2024.

³³ Harding, B. dan Camilla P. *China's Search for a Permanent Military Presence in the Pacific Islands*, <https://www.usip.org/publications/2022/07/chinas-search-permanent-military-presence-pacific-islands>, diakses pada 13 Juli 2024.

³⁴ KumparanNEWS. *Tidak Ada Negara Singgung Isu Papua pada Sidang Majelis Umum PBB 2023*, dalam <https://kumparan.com/kumparannews/tidak-ada-negara-singgung-isu-papua-pada-sidang-majelis-umum-pbb-2023-21HYzierQkm/full>, diakses pada 13 Juli 2024.

internasional sehingga dipandang memusuhi Indonesia, lewat optimalisasi diplomasi dalam bentuk kerja sama di bidang kepolisian Vanuatu tidak menolak undangan untuk ikut serta dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Polri.

Kehadiran dan aktivitas negara-negara besar ini dalam forum regional dan internasional bisa mempengaruhi framing dan narasi tentang isu-isu di kawasan, termasuk hak asasi manusia dan keamanan regional. Mereka sering memiliki sumber daya media dan diplomasi yang lebih besar yang bisa digunakan untuk mempengaruhi opini publik dan keputusan politik di negara-negara MSG. Hal ini menuntut Polri untuk tidak hanya terlibat dalam diplomasi bilateral dengan negara-negara MSG tetapi juga untuk membangun aliansi dan kemitraan yang lebih luas untuk menyeimbangkan pengaruh eksternal ini. Polri harus berusaha keras dalam membangun narasi yang efektif dan berbasis fakta untuk menonjolkan komitmen Indonesia dalam stabilitas regional dan pembangunan bersama.

Menghadapi tantangan ini, Polri perlu mengadopsi pendekatan diplomasi yang multifaset. Hal ini mencakup memperkuat kerja sama keamanan dengan negara-negara MSG melalui inisiatif bersama, pelatihan, dan pertukaran intelijen, sambil juga terlibat dalam diplomasi multilateral untuk mempengaruhi norma dan kebijakan regional. Strategi ini harus didukung oleh komunikasi yang kuat dan kebijakan luar negeri yang koheren yang memperjelas tujuan dan nilai-nilai Indonesia. Dengan cara ini, Polri bisa lebih efektif dalam menavigasi dinamika kompleks kawasan dan memastikan bahwa pengaruh eksternal tidak menggoyahkan hubungan bilateral dengan negara-negara MSG atau menghambat kepentingan strategis Indonesia di Pasifik.

d. Kolaborasi Keamanan Transnasional.

Kolaborasi keamanan transnasional terkait diplomasi Polri terhadap Melanesian Spearhead Group (MSG) menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan kapasitas dan prioritas keamanan di antara negara-negara anggota MSG. Misalnya, beberapa negara mungkin memiliki sumber daya terbatas dan infrastruktur

keamanan yang kurang berkembang, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara efektif dalam inisiatif keamanan bersama. Hal ini memerlukan pendekatan yang fleksibel dan adaptif dari Polri untuk memfasilitasi kerja sama, termasuk menyediakan pelatihan, dukungan teknis, dan sumber daya untuk membangun kapasitas keamanan nasional yang lebih kuat di negara-negara tersebut.

Selanjutnya, tantangan signifikan lainnya adalah isu hukum dan kedaulatan yang bisa muncul dalam kerja sama transnasional. Setiap negara anggota MSG memiliki hukum dan regulasi sendiri yang mengatur operasi keamanan, yang bisa berbeda dan bahkan kontradiktif dengan kebijakan negara lain. Hal ini bisa menciptakan hambatan hukum dalam pertukaran informasi, ekstradisi tersangka, dan operasi gabungan. Polri harus bekerja dengan hati-hati dalam merundingkan kerangka kerja kerja sama yang menghormati kedaulatan hukum setiap negara sambil memfasilitasi kerja sama keamanan yang efektif dan responsif terhadap ancaman transnasional seperti perdagangan narkoba, terorisme, dan kejahatan siber.

Akhirnya, isu kepercayaan dan persepsi juga memainkan peran krusial dalam kolaborasi keamanan transnasional. Perbedaan persepsi tentang ancaman dan prioritas keamanan bisa menghambat pembentukan kepercayaan antarnegara. Untuk mengatasi hal ini, Polri perlu menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kerja sama regional melalui diplomasi terbuka dan transparan, serta memastikan bahwa semua kegiatan kerja sama dilakukan dengan cara yang adil dan menghormati kepentingan semua pihak yang terlibat. Upaya ini termasuk berbagi informasi secara proaktif, berpartisipasi dalam pertemuan dan konferensi keamanan regional, dan mengadakan latihan bersama untuk memperkuat hubungan operasional dan membangun kepercayaan timbal balik.

e. Keragaman Budaya dan Politik.

Keragaman budaya dan politik dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) menimbulkan tantangan signifikan untuk diplomasi Polri karena memerlukan pendekatan yang sensitif dan beradaptasi dengan konteks lokal yang beragam. Negara-negara anggota MSG, seperti Papua Nugini, Fiji,

Vanuatu, dan Kepulauan Solomon, memiliki latar belakang budaya yang sangat berbeda, yang mempengaruhi cara mereka menanggapi inisiatif diplomatik dan keamanan. Misalnya, apa yang mungkin dianggap sebagai tindakan diplomasi standar oleh Indonesia bisa ditafsirkan secara berbeda oleh negara anggota MSG karena perbedaan dalam norma sosial atau harapan politik. Polri perlu memahami dan menghormati keragaman ini untuk membangun hubungan yang efektif dan produktif.

Dalam konteks politik, negara-negara MSG sering mengalami perubahan politik yang cepat dan terkadang tiba-tiba, yang bisa mempengaruhi kontinuitas dan konsistensi dalam kebijakan luar negeri dan kerja sama keamanan. Perubahan pemerintahan dapat mengakibatkan perubahan dalam prioritas kebijakan atau pendekatan terhadap kerja sama internasional, termasuk dengan Indonesia. Hal ini menantang Polri untuk terus menyesuaikan strategi diplomatiknya dan memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan politik baru serta menjamin bahwa inisiatif yang sedang berlangsung tetap relevan dan sesuai dengan agenda politik yang berubah.

Terakhir, perbedaan dalam sistem hukum dan tata kelola antarnegara dalam MSG juga menambah kompleksitas dalam kerja sama keamanan dan penegakan hukum. Setiap negara memiliki kerangka hukum dan prosedur penegakan yang unik yang mungkin tidak selalu selaras dengan sistem Indonesia. Hal ini memerlukan negosiasi dan kerjasama yang hati-hati untuk mengembangkan protokol bersama yang menghormati keragaman hukum dan mengatasi hambatan operasional. Polri, dalam melakukan diplomasi keamanan, harus melibatkan ahli hukum dan praktisi dari kedua belah pihak untuk memastikan bahwa upaya kerjasama dijalankan dalam kerangka yang legal dan saling menguntungkan, mengakui dan mengadaptasi keragaman ini sebagai bagian integral dari strategi diplomasi.

f. Isu Lingkungan dan Bencana Alam.

Isu lingkungan dan bencana alam merupakan tantangan penting dalam diplomasi Polri terhadap negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) karena wilayah Pasifik sering kali dihadapkan pada fenomena

alam yang ekstrem seperti siklon, tsunami, dan erupsi gunung berapi. Kerentanan ini memerlukan respons yang efektif dan koordinasi bantuan lintas negara, yang menantang Polri dalam mengintegrasikan upaya keamanan dan bantuan kemanusiaan dengan diplomasi tradisional. Ketika bencana terjadi, kerja sama cepat dan efektif antarnegara menjadi penting, dan kemampuan Polri untuk terlibat dalam operasi bantuan dapat mempengaruhi persepsi negara-negara MSG terhadap komitmen Indonesia terhadap solidaritas regional dan kerja sama.

Selain itu, isu lingkungan jangka panjang seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam juga menjadi perhatian utama di kawasan Pasifik. Negara-negara MSG, yang banyak di antaranya mengalami ancaman langsung dari kenaikan permukaan laut dan kerusakan ekosistem, mengharapkan Indonesia sebagai mitra regional untuk berkontribusi aktif dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Tantangan untuk Polri dalam hal ini bukan hanya seputar penegakan hukum dan keamanan tetapi juga melibatkan diplomasi lingkungan yang mempromosikan kerja sama dalam pengelolaan bencana dan perlindungan lingkungan. Efektivitas dalam isu ini dapat mendukung atau menghambat hubungan diplomasi, tergantung pada bagaimana Indonesia, melalui Polri dan lembaga lainnya, menanggapi kebutuhan dan harapan regional.

Terakhir, kerjasama dalam pengelolaan bencana dan isu lingkungan membutuhkan kolaborasi yang luas antarlembaga dan antarnegara. Tantangan untuk Polri adalah memastikan bahwa koordinasi ini berjalan mulus, menghormati kedaulatan nasional sambil memfasilitasi pertukaran informasi dan sumber daya yang cepat. Strategi diplomasi harus mencakup pembentukan mekanisme regional untuk bencana dan perlindungan lingkungan yang tidak hanya efisien tetapi juga inklusif, memungkinkan semua negara MSG, terlepas dari ukuran atau sumber daya ekonomi, untuk berpartisipasi secara penuh dan adil. Dengan melakukan ini, Polri dan Indonesia secara lebih luas dapat memperkuat hubungan mereka dengan negara-negara MSG melalui solidaritas yang dibuktikan dalam menghadapi bencana dan tantangan lingkungan.

g. Kompetisi Sumber Daya.

Kompetisi sumber daya adalah tantangan utama dalam diplomasi Polri terhadap negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) karena kawasan Pasifik kaya akan sumber daya alam yang berharga seperti mineral, gas, dan hasil hutan. Negara-negara ini sering menghadapi tekanan dari aktor eksternal yang berusaha mengakses sumber daya ini, yang bisa memicu ketegangan dan persaingan tidak hanya antar negara anggota MSG tetapi juga dengan kekuatan global yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut. Indonesia, melalui Polri, harus navigasi dalam kompetisi sumber daya ini dengan cara yang mendukung kestabilan regional dan kerja sama sambil menjaga kepentingan nasionalnya sendiri. Ini memerlukan pendekatan yang seimbang antara mengejar keuntungan ekonomi dan memperkuat hubungan diplomatik melalui kebijakan yang adil dan transparan.

Di samping itu, tantangan ini juga menimbulkan isu lingkungan yang bisa mempengaruhi hubungan bilateral dan multilateral. Eksploitasi sumber daya alam sering kali terkait dengan kerusakan lingkungan yang signifikan, yang dapat memicu kritik dari masyarakat internasional dan kelompok-kelompok lokal. Untuk menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara MSG, Polri perlu memastikan bahwa aktivitas yang terkait dengan sumber daya alam di wilayah ini dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Hal ini termasuk mendorong perusahaan dan investor Indonesia untuk mengikuti standar lingkungan yang tinggi dan berpartisipasi dalam proyek-proyek yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat, sehingga memperkuat citra Indonesia sebagai mitra yang bertanggung jawab.

Selanjutnya, persaingan sumber daya juga bisa mempengaruhi dinamika keamanan dalam kawasan. Misalnya, persaingan atas sumber daya yang tidak dikelola dengan baik bisa memicu konflik lokal atau meningkatkan ketidakstabilan politik di negara-negara MSG. Dalam konteks

ini, Polri memiliki peran penting dalam mendukung inisiatif keamanan regional yang mengintegrasikan pengelolaan sumber daya sebagai bagian dari strategi keseluruhan. Kerja sama regional dalam pengelolaan sumber daya, termasuk perjanjian bersama, patroli keamanan bersama, dan program pembangunan berkelanjutan, bisa membantu mengurangi risiko konflik dan memperkuat kerja sama lintas negara, mendukung sebuah lingkungan yang stabil dan damai di kawasan Pasifik.

h. Kapasitas Institusional dan Sumber Daya.

Tantangan kapasitas institusional dan sumber daya dalam diplomasi Polri terhadap Melanesian Spearhead Group (MSG) adalah faktor penting yang mempengaruhi efektivitas interaksi Indonesia dengan negara-negara anggota grup ini. Seringkali, terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat pengembangan dan sumber daya yang tersedia antara Indonesia dan beberapa negara MSG, yang bisa mempengaruhi dinamika kerja sama. Indonesia mungkin memiliki lebih banyak sumber daya dan kapasitas institusional yang lebih matang dibandingkan dengan beberapa negara Pasifik yang lebih kecil, namun ini juga menuntut tanggung jawab lebih besar dalam memimpin dan mengkoordinasikan inisiatif regional. Dalam konteks ini, Polri harus berusaha untuk tidak hanya memperluas kapasitasnya sendiri tapi juga membantu membangun kapasitas di negara-negara MSG melalui program pelatihan, bantuan teknis, dan pertukaran keilmuan.

Selain itu, keterbatasan dalam kapasitas institusional seringkali berdampak pada kemampuan negara-negara MSG untuk berpartisipasi secara penuh dalam inisiatif keamanan regional atau multilateral yang diusulkan oleh Indonesia. Hal ini bisa meliputi keterbatasan dalam teknologi, infrastruktur, atau keahlian yang diperlukan untuk implementasi efektif dari proyek-proyek bersama, seperti penegakan hukum lintas batas, pengawasan maritim, atau respons bencana. Polri, dalam perannya sebagai bagian dari diplomasi Indonesia, perlu menjadi pemain yang proaktif dalam mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan ini, menawarkan solusi yang disesuaikan yang memungkinkan semua pihak untuk berkontribusi dan mendapat manfaat dari kerja sama.

Terakhir, tantangan dalam hal sumber daya juga mencakup keterbatasan finansial untuk mendukung inisiatif berskala besar atau berkelanjutan. Meskipun Indonesia memiliki ekonomi yang relatif lebih besar dibandingkan negara-negara MSG lainnya, tantangan ekonomi domestik dan prioritas anggaran bisa membatasi seberapa banyak sumber daya yang dapat dialokasikan untuk inisiatif diplomasi atau keamanan. Oleh karena itu, sangat penting bagi Polri untuk berkolaborasi dengan lembaga donor internasional, organisasi regional, dan mitra bilateral untuk mengamankan pendanaan dan sumber daya lain yang diperlukan. Ini tidak hanya membantu dalam memperkuat kapasitas lokal tetapi juga membangun goodwill dan kepercayaan, yang krusial untuk memelihara hubungan jangka panjang yang stabil dan produktif dengan negara-negara anggota MSG.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Polri perlu mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dan inovatif dalam diplomasi. Selain itu, perlu ada peningkatan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan lembaga lain untuk memastikan bahwa strategi diplomasi keamanan terintegrasi dengan baik dalam kebijakan luar negeri Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, Polri mengembangkan program kerjasama yang memberi manfaat langsung kepada negara-negara MSG juga bisa menjadi cara efektif untuk memperkuat hubungan dan mengurangi pengaruh negara lain dalam kawasan, antara lain:

a. Papua Nugini

Polri telah membuat perjanjian internasional dengan Kepolisian Papua Nugini ini berjudul Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang Kerja Sama Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional dan Peningkatan Kapasitas, yang ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2015 di Port Moresby dan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama 5 (lima) tahun melalui kesepakatan tertulis Para Pihak.

Nota Kesepahaman tersebut kemudian diperpanjang melalui penandatanganan Memorandum Saling Pengertian antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Kerajaan Papua Nugini mengenai Kerjasama Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Transnasional dan

Pengembangan Kapasitas, yang ditandatangani pada tanggal 5 Mei 2023 di Jakarta dan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya atas kesepakatan tertulis bersama oleh Para Pihak.

Dengan demikian, hubungan kerjasama kepolisian dengan Papua Nugini telah terbentuk dengan ditandatanganinya Memorandum Saling Pengertian dan selanjutnya kedua belah pihak akan melaksanakan implementasi kerjasama dengan menyusun program-program yang telah disepakati bersama dan tertuang dalam pasal Bentuk Kerjasama pada Memorandum Saling Pengertian tersebut.

b. Fiji

Polri telah membuat perjanjian internasional dengan dengan Kepolisian Fiji berjudul Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan, Keamanan Nasional dan Imigrasi Republik Fiji tentang Kerjasama dalam Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara dan Peningkatan Kapasitas, yang ditandatangani pada tanggal 23 November 2011 di Jakarta dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka 3 (tiga) tahun berikutnya melalui kesepakatan tertulis Para Pihak.

Nota Kesepahaman tersebut kemudian diperpanjang melalui penandatanganan Protokol Perpanjangan Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan dan Keamanan Nasional Republik Fiji tentang Kerjasama dalam Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara dan Peningkatan Kapasitas, yang ditandatangani pada tanggal 9 November 2016 di Bali dan berlaku selama 3 (tiga) tahun melalui kesepakatan bersama secara tertulis Para Pihak. Dengan demikian, status perjanjian internasional ini sudah habis masa berlakunya dan perlu upaya untuk melakukan negosiasi perpanjangannya.

Dalam upaya optimalisasi diplomasi dengan negara anggota MSG, maka Polri bekerjasama dengan Kemenlu RI (dalam hal ini dengan Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional dan Ditjen Aspasaf) perlu melakukan konsolidasi untuk membuka jalur komunikasi diplomatik dengan Fiji untuk

membahas perpanjangan perjanjian internasional kerjasama teknis antara kedua kepolisian.

c. Vanuatu

Polri telah membuat perjanjian internasional dengan dengan Kepolisian Vanuatu berjudul Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Vanuatu tentang Kerjasama dalam Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara dan Pengembangan Kapasitas yang ditandatangani pada tanggal 23 April 2009 di Jakarta dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui untuk 3 (tiga) tahun berikutnya melalui kesepakatan bersama secara tertulis.

Implementasi kerjasama ini telah dilakukan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini, namun kemudian terkendala karena adanya komunikasi yang kurang harmonis antara kedua belah pihak. Pada saat pertemuan the *4th Melanesian Spearhead Group (MSG) Regional Security Strategy (RSS) Working Group Meeting*, yang dilaksanakan pada tanggal 23 – 27 Mei 2022 di Hotel Dynasty Resort, Bali Indonesia, delegasi Vanuatu menyampaikan permohonan untuk melakukan *Bilateral Meeting* dengan Polri. Permohonan tersebut disetujui dan dilaksanakan pertemuan bilateral disela-sela pertemuan MSG RSS WG ke-4. Pada kesempatan tersebut, delegasi Vanuatu menyampaikan apresiasinya kepada Polri dan mengajukan permohonan untuk menjalin kembali kerjasama yang selama ini sudah terjalin. Pernyataan delegasi Vanuatu tersebut merupakan pintu masuk bagi Polri untuk melakukan kerjasama kembali dan sekaligus melakukan optimalisasi diplomasi guna mendukung kepentingan nasional, khususnya terhadap isu OPM.

d. Kepulauan Solomon

Polri telah menginisiasi pembentukan perjanjian internasional dengan Kepolisian Kepulauan Solomon sejak tahun 2017. Draf perjanjian internasional yang sedang dibahas tersebut berjudul *Memorandum of Understanding between the Indonesian National Police of the Republic of Indonesia and the Ministry of Police, National Security, Correctional Services*

of Solomon Islands on Cooperating and Combating Transnational Crime and Capacity Building

Sampai saat ini, proses pembahasan finalisasi draft perjanjian internasional dan rencana penandatanganan masih belum selesai. Untuk optimalisasi diplomasi terhadap negara anggota MSG, tentunya hal ini harus segera diselesaikan sehingga perjanjian internasional teknis tersebut dapat ditandatangani dan kemudian dijadikan dasar implementasi kerjasama selanjutnya.

14. Faktor-faktor yang mempengaruhi diplomasi Polri terhadap negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional telah memberikan kerangka untuk memahami bagaimana diplomasi Polri dapat dioptimalkan dalam konteks hubungannya dengan Melanesian Spearhead Group (MSG) untuk mendukung kepentingan nasional Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa UU ini mengatur bagaimana Indonesia membuat, mengikat diri, dan menjalankan perjanjian internasional. Hal ini mencakup proses negosiasi, ratifikasi, dan implementasi perjanjian yang mencerminkan komitmen Indonesia dalam berpartisipasi dalam tata kelola global dan kerja sama internasional. UU ini juga menekankan pentingnya perjanjian internasional dalam melindungi kepentingan nasional serta meningkatkan Soft power Indonesia di kancah internasional.

Soft power adalah kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi negara lain untuk mendapatkan hasil yang diinginkan melalui daya tarik dan persuasi, bukan melalui koersi atau pembayaran. Joseph Nye menekankan pentingnya budaya, nilai politik, dan kebijakan luar negeri dalam menarik negara lain untuk mengadopsi pandangan atau posisi yang serupa. Dalam konteks MSG, Polri dapat menggunakan soft power untuk meningkatkan pengaruh Indonesia melalui kerja sama kepolisian, pelatihan bersama, bantuan dalam manajemen bencana, dan program pertukaran budaya yang menunjukkan nilai-nilai Indonesia, profesionalisme Polri, dan komitmen terhadap regionalisme yang inklusif dan

damai. Inisiatif-inisiatif ini mencerminkan soft power dengan menggambarkan Indonesia sebagai mitra yang berharga dan dapat dipercaya.

Melalui UU No. 24/2000, Indonesia dapat menginisiasi atau menjadi bagian dari perjanjian internasional yang menguntungkan semua negara anggota MSG. Perjanjian tersebut bisa berupa kerja sama keamanan, pengelolaan sumber daya alam, atau perjanjian tentang respons bersama terhadap bencana alam. Perjanjian semacam itu tidak hanya mengikat secara hukum tetapi juga memperkuat hubungan diplomasi melalui komitmen bersama. Dengan mengadopsi dan mengimplementasikan perjanjian internasional sesuai UU No. 24/2000, Polri menunjukkan kepatuhan Indonesia terhadap hukum internasional, yang meningkatkan legitimasi negara di mata negara-negara MSG. Ini adalah aspek penting dari soft power, di mana penghormatan terhadap norma dan hukum internasional meningkatkan daya tarik Indonesia.

Melalui diplomasi yang menggabungkan perjanjian internasional dan soft power, Polri dapat lebih efektif mendukung kepentingan nasional Indonesia seperti stabilitas regional, keamanan perbatasan, dan pengelolaan sumber daya. Ini juga membantu dalam mengelola narasi seputar isu Papua, dengan menekankan pada komitmen Indonesia terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan hak asasi manusia. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip dalam UU tentang Perjanjian Internasional dan konsep soft power, Polri dapat meningkatkan keefektifan diplomasi Indonesia terhadap negara-negara MSG, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci yang berpengaruh di kawasan Pasifik.

Namun demikian, optimalisasi diplomasi Polri terhadap Melanesian Spearhead Group (MSG) telah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang meliputi dinamika internal Indonesia, hubungan regional, dan kondisi global. Berikut ini adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi diplomasi Polri dalam konteks ini:

a. Isu Internal Papua.

Isu Papua telah menjadi aspek sentral yang mempengaruhi diplomasi Polri terhadap Melanesian Spearhead Group (MSG), memberikan nuansa khusus pada hubungan antara Indonesia dan anggota MSG. Sejumlah negara dalam MSG, khususnya Vanuatu, telah secara terbuka mendukung

aspirasi kemerdekaan di Papua, yang menantang posisi Indonesia terhadap kedaulatannya. Dukungan ini seringkali diungkapkan dalam forum internasional, termasuk di PBB, yang memaksa Indonesia untuk lebih aktif dalam diplomasi untuk mengelola persepsi dan realitas terkait situasi di Papua.

Dalam konteks ini, Polri, sebagai bagian dari aparat keamanan Indonesia, berusaha memperkuat pendekatan diplomasi melalui berbagai inisiatif, termasuk diplomasi kepolisian yang tidak hanya terbatas pada penanganan kejahatan, tetapi juga membangun pemahaman bersama dan kerjasama di bidang keamanan. Kegiatan seperti pelatihan bersama, pertukaran informasi, dan operasi gabungan menjadi sarana untuk menunjukkan profesionalitas dan standar operasional Polri, sambil memperdalam hubungan yang lebih konstruktif dengan kepolisian dan lembaga keamanan negara-negara anggota MSG. Pendekatan ini juga bertujuan untuk menurunkan tingkat dukungan terhadap gerakan separatisme melalui diplomasi kepolisian yang efektif dan dialog yang berkesinambungan.

Selain itu, diplomasi Polri juga mencakup upaya-upaya untuk menanggapi kritik internasional mengenai isu hak asasi manusia di Papua. Polri berusaha untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam mempromosikan HAM dan pembangunan sosio-ekonomi di Papua melalui kerja sama keamanan yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat legitimasi tindakan Indonesia di mata internasional, tetapi juga membantu mengurangi tensi dan kesalahpahaman dengan negara-negara anggota MSG. Upaya ini penting untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia dan menjaga stabilitas regional di kawasan Pasifik.

b. Kapabilitas dan Sumber Daya Polri.

Kemampuan Polri dalam menyediakan sumber daya, pelatihan, dan teknologi juga mempengaruhi efektivitas diplomasi mereka. Kapasitas untuk memberikan bantuan, berpartisipasi dalam operasi gabungan, dan memimpin inisiatif regional menentukan seberapa efektif Polri dalam

mendukung kepentingan nasional melalui diplomasi. Kapabilitas dan sumber daya Polri memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas diplomasi kepolisian terhadap Melanesian Spearhead Group (MSG). Sebagai lembaga keamanan terbesar di Indonesia, Polri memiliki beragam sumber daya yang memungkinkan untuk melakukan operasi keamanan dan kerjasama internasional. Namun, kendala sumber daya seperti pembatasan anggaran, ketersediaan personel yang terlatih dalam diplomasi kepolisian internasional, dan teknologi mutakhir bisa membatasi jangkauan dan kedalaman kerjasama keamanan yang bisa dibina dengan negara-negara MSG.

Polri telah berusaha mengatasi keterbatasan ini dengan meningkatkan kapabilitas personelnnya melalui pelatihan dan pendidikan, baik di dalam maupun luar negeri, untuk mengembangkan keahlian dalam penanganan masalah keamanan transnasional dan diplomasi. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan Polri dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dengan kepolisian negara-negara MSG, yang sangat penting dalam pembangunan kepercayaan dan kerjasama teknis. Upaya ini juga mencakup penguatan kapasitas institusional melalui peningkatan teknologi dan sistem informasi kepolisian yang memadai, yang mendukung operasi dan koordinasi lintas negara.

Dengan terus memperkuat sumber daya ini, Polri dapat lebih efektif dalam menyusun dan melaksanakan strategi diplomasi yang komprehensif terhadap MSG. Kapasitas yang ditingkatkan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan Polri untuk berkontribusi pada stabilitas regional tetapi juga memungkinkan Polri untuk menjadi mitra yang lebih berpengaruh dalam forum-forum internasional. Melalui diplomasi kepolisian yang lebih dinamis dan berdaya tawar tinggi, Polri dapat lebih baik dalam mengadvokasi kepentingan Indonesia di kawasan Pasifik, memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi isu-isu sensitif seperti Papua, dan memperdalam hubungan bilateral dengan negara-negara anggota MSG.

c. Peran dan Pengaruh Eksternal.

Intervensi dan pengaruh dari kekuatan eksternal, seperti Australia, Amerika Serikat, dan China, dalam kawasan Pasifik juga mempengaruhi diplomasi Polri. Misalnya, pendekatan keamanan yang didorong oleh kepentingan eksternal bisa berbeda dan memerlukan penyesuaian strategi oleh Indonesia. Peran dan Pengaruh Eksternal di kawasan Pasifik, khususnya yang melibatkan Melanesian Spearhead Group (MSG), telah memberikan konteks yang kompleks bagi diplomasi Polri. Kawasan ini secara tradisional menjadi arena interaksi beragam kekuatan besar, serta memainkan peran penting dalam keamanan dan stabilitas regional. Penambahan atau pergeseran kekuatan geopolitik dari negara-negara seperti Tiongkok, Australia, dan Amerika Serikat telah meningkatkan intensitas persaingan di wilayah ini, yang mana masing-masing negara berusaha untuk memperluas pengaruh mereka melalui berbagai cara, termasuk melalui bantuan keamanan dan ekonomi, serta inisiatif diplomasi.

Sebagai respons, Polri, dalam kapasitasnya sebagai bagian dari upaya diplomasi keamanan Indonesia, harus menavigasi landasan yang sensitif dan seringkali kompleks. Ini termasuk mengatasi dampak dari dukungan eksternal terhadap gerakan separatis di Papua yang diungkapkan oleh beberapa anggota MSG. Polri perlu mengimbangi antara menjaga kedaulatan dan integritas nasional dengan membangun hubungan yang baik dengan negara-negara MSG. Pendekatan yang digunakan sering kali harus sensitif terhadap kepentingan strategis negara-negara lain di kawasan ini, sambil mencoba mengamankan dukungan untuk posisi Indonesia terhadap isu-isu sensitif.

Pada saat yang sama, Polri juga mengambil peran aktif dalam upaya kerjasama multilateral di kawasan tersebut, termasuk inisiatif terkait keamanan maritim dan penanganan kejahatan transnasional. Keaktifan dalam kerjasama regional ini tidak hanya membantu mengamankan kepentingan Indonesia, tetapi juga memperkuat posisi negara dalam struktur keamanan regional yang lebih luas. Melalui diplomasi kepolisian dan kerjasama praktis, Polri berusaha untuk menegaskan komitmennya terhadap

perdamaian dan keamanan regional, serta menunjukkan kemampuan Indonesia sebagai negara yang bertanggung jawab dalam mengatasi tantangan keamanan yang bersifat lintas batas.

d. Kebijakan Luar Negeri Indonesia.

Kebijakan luar negeri Indonesia, yang bertujuan mempromosikan stabilitas, perdamaian, dan kerjasama regional, memberikan kerangka yang berpengaruh dalam operasional diplomasi Polri, khususnya dalam interaksinya dengan Melanesian Spearhead Group (MSG). Kebijakan ini mengedepankan politik luar negeri bebas aktif yang memungkinkan Indonesia untuk berinteraksi secara fleksibel dengan berbagai negara tanpa terikat dalam aliansi yang mengikat. Dalam konteks MSG, hal ini memungkinkan Polri untuk menjalin kerjasama keamanan dengan anggota MSG tanpa terbebani oleh perbedaan politik yang mungkin ada, terutama terkait isu sensitif seperti situasi di Papua.

Dalam menjalankan diplomasi, Polri mendapatkan dukungan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia yang memastikan bahwa semua inisiatif kepolisian sejalan dengan tujuan kebijakan luar negeri yang lebih luas. Misalnya, dalam menangani isu Papua yang sensitif, Polri perlu mengambil pendekatan yang tidak hanya efektif dalam menangani masalah keamanan, tetapi juga yang diplomatis untuk mencegah atau mengurangi kritik internasional dan meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap posisi Indonesia. Ini mencakup kerja sama dalam pelatihan kepolisian, pertukaran informasi, dan operasi bersama yang tidak hanya memperkuat kapasitas keamanan tetapi juga memperdalam hubungan bilateral dan kepercayaan.

Selain itu, kebijakan luar negeri Indonesia yang menekankan pada kerjasama ekonomi dan pembangunan sosial juga membuka jalan bagi Polri untuk menginisiasi atau terlibat dalam program-program yang mendukung pengembangan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup di kawasan Melanesia. Program-program seperti bantuan pembangunan, bantuan kemanusiaan, dan inisiatif pendidikan dapat menjadi bagian dari diplomasi kepolisian, di mana Polri tidak hanya terlihat sebagai penegak hukum tetapi

juga sebagai agen pembangunan dan kerjasama yang positif. Keterlibatan ini secara langsung mendukung kebijakan luar negeri yang lebih luas dan membantu memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang proaktif dan peduli dalam memajukan kawasan Pasifik, termasuk dalam MSG.

e. Kerjasama Keamanan Regional.

Kerjasama keamanan regional merupakan salah satu pilar penting dalam diplomasi Polri terhadap Melanesian Spearhead Group (MSG). Ini terutama penting mengingat tantangan keamanan transnasional yang sering terjadi di kawasan Pasifik, seperti perdagangan narkoba, kejahatan siber, dan terorisme. Polri, melalui inisiatif kerjasama keamanan regional, telah bekerja sama dengan kepolisian negara-negara anggota MSG untuk mengatasi isu-isu ini secara kolektif. Inisiatif ini mencakup berbagai kegiatan seperti pelatihan bersama, pertukaran informasi, dan operasi gabungan, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas penanganan kejahatan transnasional di kawasan tersebut.

Pendekatan kerjasama ini juga memiliki dampak strategis dalam diplomasi, memungkinkan Polri untuk membangun dan memperkuat hubungan kepercayaan dengan negara-negara anggota MSG. Dalam konteks ini, diplomasi keamanan tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada pembangunan kapasitas dan pemberdayaan kepolisian negara-negara anggota. Dengan demikian, Polri tidak hanya dipandang sebagai mitra dalam penanganan isu keamanan, tetapi juga sebagai pemain aktif dalam pembangunan keamanan regional yang inklusif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, kerjasama keamanan regional juga membantu dalam mengurangi ketegangan dan memperbaiki citra Indonesia di mata negara-negara MSG, terutama terkait dengan isu Papua. Dengan menunjukkan komitmen pada stabilitas dan keamanan regional melalui kerjasama yang konstruktif, Polri dapat secara tidak langsung mempengaruhi persepsi negara-negara MSG tentang Indonesia. Ini penting untuk meminimalkan dukungan terhadap gerakan separatisme di Papua dan meningkatkan pemahaman regional terhadap upaya yang dilakukan Indonesia dalam

mengatasi berbagai tantangan di provinsi tersebut. Dengan demikian, kerjasama keamanan tidak hanya memperkuat keamanan tetapi juga mendukung kestabilan politik dan diplomasi Indonesia di kawasan Pasifik.

f. Perubahan Sosial dan Politik di Negara-negara MSG.

Perubahan sosial dan politik yang terjadi di negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) memiliki dampak signifikan terhadap diplomasi Polri dalam konteks ini. Sebagai kawasan yang dinamis, negara-negara Melanesia sering mengalami pergantian pemerintahan, reformasi politik, dan pergolakan sosial, yang semua ini bisa mempengaruhi kestabilan regional serta hubungan bilateral dengan Indonesia. Perubahan ini membutuhkan pendekatan yang fleksibel dan responsif dari Polri dalam menjalin hubungan diplomasi, sehingga kebijakan dan taktik yang digunakan dapat diadaptasi dengan cepat sesuai dengan kondisi terkini.

Perubahan pemerintahan, misalnya, bisa membawa kebijakan luar negeri baru dan prioritas keamanan yang berbeda. Ini berpotensi mengubah dinamika kerjasama yang telah ada antara Polri dan kepolisian negara-negara MSG. Sebagai contoh, pemerintahan baru di sebuah negara MSG mungkin lebih terbuka untuk meningkatkan kerjasama keamanan atau sebaliknya, mungkin lebih kritis terhadap posisi Indonesia terkait isu-isu tertentu seperti situasi di Papua. Polri harus siap mengantisipasi perubahan ini dengan menjaga komunikasi yang efektif dan terus-menerus, serta dengan diplomasi yang sensitif dan proaktif.

Selain itu, gerakan sosial dan politik di dalam negara-negara MSG, seperti gerakan pro-demokrasi atau kampanye hak asasi manusia, juga bisa mempengaruhi hubungan bilateral. Misalnya, peningkatan kesadaran dan aktivisme mengenai hak asasi manusia dapat membuat isu-isu seperti penanganan konflik di Papua menjadi lebih menonjol dalam dialog regional. Polri perlu mengelola diplomasi kepolisiannya dengan cara yang memastikan bahwa isu-isu sensitif ditangani dengan cara yang tidak hanya memenuhi standar internasional tetapi juga menghormati perspektif dan sensitivitas

lokal, memperkuat hubungan kerjasama, dan meminimalkan potensi konflik atau kesalahpahaman.

Pendekatan yang efektif dalam diplomasi Polri terhadap MSG memerlukan pemahaman mendalam tentang semua faktor ini, serta kemampuan untuk menyesuaikan strategi dan inisiatif keamanan sesuai dengan kondisi yang berubah. Polri juga harus berupaya untuk memperkuat hubungan bilateral melalui dialog terbuka, kerjasama yang saling menguntungkan, dan diplomasi yang bertanggung jawab untuk mendukung stabilitas regional dan kepentingan nasional Indonesia.

15. Strategi Optimalisasi diplomasi Polri terhadap negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) guna mendukung kepentingan nasional Indonesia

Diplomasi Polri terhadap negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) mengandalkan pendekatan yang beragam dan komprehensif, bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral dan multilateral serta meningkatkan kerja sama keamanan regional. Strategi ini meliputi: a. Kerja Sama Keamanan yang Lebih Terintegrasi; b. Diplomasi Publik dan Soft Power; c. Penguatan Hubungan Bilateral dan Multilateral; d. Kerja Sama dalam Manajemen Krisis dan Bencana; serta e. Peningkatan Kerja Sama Teknis dan Pengembangan Kapasitas. Dengan demikian, untuk mengoptimalkan diplomasi Polri terhadap negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) dalam mendukung kepentingan nasional Indonesia, beberapa strategi khusus dapat dirancang dan diimplementasikan, sebagai berikut:

a. Kerja Sama Keamanan yang Lebih Terintegrasi.

Strategi kerja sama keamanan yang lebih terintegrasi merupakan salah satu aspek kunci dalam optimasi diplomasi Polri terhadap negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) untuk mendukung kepentingan nasional Indonesia. Langkah ini memperkuat kapasitas regional dalam mengatasi tantangan keamanan bersama, membangun kepercayaan, dan mengamankan kepentingan strategis Indonesia di kawasan Pasifik.

Berikut adalah beberapa komponen utama dari kerja sama keamanan yang lebih terintegrasi dalam konteks ini:

1) Pertukaran Intelijen dan Informasi

Strategi kerja sama intelijen adalah pilar utama dalam membangun keamanan yang terintegrasi. Pertukaran informasi tentang kegiatan terorisme, kejahatan transnasional, dan ancaman lainnya memungkinkan negara-negara anggota MSG untuk responsif dan proaktif dalam menanggulangi ancaman tersebut, Polri dapat menyelenggarakan pertemuan reguler dan workshop dengan badan kepolisian di negara-negara MSG untuk mendiskusikan tren kejahatan terkini dan taktik penanganannya. Mengembangkan sistem berbagi data yang aman untuk mempercepat pertukaran informasi penting.

2) Latihan dan Manuver Bersama

Melaksanakan latihan keamanan bersama memperkuat kemampuan operasional dan membangun pemahaman bersama antara anggota kepolisian dari berbagai negara. Latihan bersama dapat mencakup manuver bersama yang mensimulasikan skenario keamanan seperti penanggulangan terorisme, penyelundupan, dan bencana alam serta menyelenggarakan workshop dan seminar untuk meningkatkan keahlian teknis dan taktikal anggota kepolisian.

3) Kerja Sama Operasional

Melibatkan operasi gabungan dalam menghadapi kejahatan yang bersifat lintas batas seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan kejahatan siber. Ini termasuk pembentukan satuan tugas bersama untuk kasus-kasus spesifik yang memerlukan tindakan koordinasi lintas negara. Selain itu membangun protokol operasional bersama yang menstandarisasi prosedur penanganan dan penyelidikan kasus.

4) Pembangunan Kapasitas dan Bantuan Teknis

Peningkatan kapasitas kepolisian negara-negara MSG melalui bantuan teknis dan transfer teknologi merupakan strategi penting untuk

stabilisasi keamanan regional melalui Polri dapat menyediakan pelatihan teknis dan sumber daya untuk pengembangan infrastruktur kepolisian serta memberikan akses ke teknologi baru dan sistem manajemen keamanan yang lebih efektif.

5) Diplomasi dan Negosiasi

Melakukan diplomasi kepolisian untuk menegosiasikan kesepakatan keamanan dan memperkuat hukum internasional serta standar operasional yang mendukung upaya penegakan hukum. Ini termasuk melakukan erundingan untuk memformalisasi kerja sama keamanan melalui perjanjian bilateral atau multilateral. Selain itu menggunakan platform regional dan internasional untuk mempromosikan dan mendukung inisiatif keamanan.

6) Peningkatan Kepercayaan dan Transparansi

Membangun kepercayaan melalui transparansi dalam operasi dan kebijakan keamanan. Kepercayaan dan keterbukaan ini esensial untuk kolaborasi jangka panjang dan menghindari kesalahpahaman, langkah yang dilakukan mengadakan pertemuan rutin antara pejabat tinggi kepolisian dari negara-negara MSG, serta menerapkan kebijakan yang menjamin perlakuan yang adil dan menghormati hak asasi manusia dalam semua operasi keamanan.

Kerja sama keamanan yang lebih terintegrasi memainkan peran vital dalam strategi diplomasi Polri untuk mendukung kepentingan nasional Indonesia di kawasan. Melalui langkah-langkah ini, Polri tidak hanya meningkatkan keamanan regional tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam pembangunan stabilitas dan kerja sama di kawasan Melanesia dan Pasifik yang lebih luas.

b. Diplomasi Publik dan Soft Power

Strategi Diplomasi Publik dan Soft Power dalam konteks optimasi diplomasi Polri terhadap negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) merupakan pendekatan krusial untuk memperkuat pengaruh

Indonesia dan mendukung kepentingan nasionalnya di kawasan Pasifik. Soft power, yang mengacu pada kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi pihak lain melalui daya tarik dan bukan paksaan, dapat diterapkan melalui berbagai inisiatif yang menunjukkan nilai-nilai, budaya, dan kebijakan Indonesia yang positif.

1) Strategi Diplomasi Publik

a) Program Pertukaran Budaya dan Pendidikan. Polri dapat melaksanakan program pertukaran budaya dan pendidikan yang memungkinkan pertukaran pelajar, akademisi, dan profesional antara Indonesia dan negara-negara MSG. Program ini bertujuan untuk membangun pemahaman dan apresiasi lintas budaya, yang pada gilirannya memperkuat hubungan diplomatik. Selain itu mengadakan festival budaya Indonesia di negara-negara MSG dan sebaliknya, yang mempromosikan kekayaan budaya dan tradisi kedua belah pihak.

b) Promosi Kebijakan dan Nilai Indonesia. Polri dapat memanfaatkan media dan platform komunikasi untuk menyebarkan informasi tentang kebijakan domestik dan internasional Indonesia yang mendukung perdamaian, pembangunan berkelanjutan, dan hak asasi manusia. Selain itu menyelenggarakan konferensi dan seminar yang menampilkan kebijakan Indonesia dalam mengatasi isu global dan regional, seperti perubahan iklim, anti-korupsi, dan pembangunan ekonomi.

2) Strategi Soft Power

a) Kolaborasi dalam Proyek Pembangunan. Polri dapat memberikan bantuan teknis dan pembangunan dalam sektor-sektor kritical seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di negara-negara MSG. Contohnya, mendirikan pusat-pusat kesehatan atau sekolah yang dibiayai oleh Indonesia, yang tidak hanya membantu masyarakat setempat tetapi juga meningkatkan citra positif Indonesia. Selain itu, melakukan kerjasama dalam proyek lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam,

menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam isu-isu keberlanjutan.

b) Dukungan dalam Manajemen Bencana dan Kemanusiaan. Polri menyediakan bantuan kemanusiaan dan dukungan logistik dalam situasi bencana di negara-negara MSG, yang menunjukkan solidaritas dan komitmen Indonesia terhadap kesejahteraan regional. Selain itu Polri mengadakan latihan bersama dan workshop tentang manajemen bencana, membagikan pengetahuan dan keahlian Indonesia dalam penanganan bencana alam.

c) Peningkatan Kerjasama Keamanan dengan Pendekatan Humanis. Polri mengimplementasikan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada masyarakat dalam operasi keamanan dengan kepolisian negara-negara MSG, menekankan pada perlindungan warga sipil dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu Polri membagi pengalaman dan praktek terbaik dalam penegakan hukum yang mengedepankan aspek pencegahan dan rehabilitasi daripada hanya penindakan.

Dengan mengintegrasikan strategi diplomasi publik dan penggunaan soft power, Polri dapat membangun hubungan yang lebih dalam dengan negara-negara MSG yang berdasarkan pada rasa hormat, kepercayaan, dan kepentingan bersama. Pendekatan ini tidak hanya mendukung kepentingan keamanan nasional Indonesia melalui peningkatan stabilitas regional tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berpengaruh dan dihormati di kawasan Pasifik.

c. Penguatan Hubungan Bilateral dan Multilateral

Strategi penguatan hubungan bilateral dan multilateral merupakan salah satu pilar utama dalam diplomasi Polri (Kepolisian Republik Indonesia) terhadap negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) untuk mendukung dan memajukan kepentingan nasional Indonesia. Kegiatan ini melibatkan serangkaian inisiatif yang dirancang untuk membangun dan memperdalam kerjasama, memperkuat kepercayaan, dan mempromosikan

stabilitas serta keamanan regional. Berikut adalah beberapa strategi kunci dalam konteks ini:

1) Kunjungan Resmi dan Pertemuan Bilateral. Mengatur kunjungan reguler antara pejabat Polri dan pejabat kepolisian negara-negara MSG. Kunjungan ini dapat mencakup pertemuan tingkat tinggi untuk membahas kerjasama keamanan, pertukaran intelijen, dan masalah hukum yang relevan. Selain itu, mengadakan sesi dialog kebijakan yang terfokus pada isu-isu penting seperti penanganan terorisme, kejahatan lintas batas, dan bantuan kemanusiaan dalam kasus bencana.

2) Forum Multilateral dan Kerjasama Regional. Polri berpartisipasi dalam inisiatif multilateral yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan regional. Ini bisa mencakup pembentukan mekanisme tanggap cepat bersama untuk bencana alam atau terorisme. Mengadakan atau berpartisipasi dalam konferensi regional dan workshop yang mengumpulkan berbagai stakeholder dari negara-negara MSG untuk membahas dan mengembangkan solusi bersama terhadap masalah keamanan.

3) Perjanjian dan Kesepakatan Keamanan. Polri merundingkan dan menandatangani perjanjian bilateral atau multilateral yang formal mengenai kerjasama keamanan, pertukaran informasi, dan pelatihan bersama. Membangun protokol operasional bersama untuk memfasilitasi koordinasi dan kerjasama yang lebih efektif dalam operasi lintas batas dan manajemen krisis.

4) Kerjasama Pembangunan Kapasitas dan Bantuan Teknis. Polri menyediakan bantuan teknis dan sumber daya untuk membantu negara-negara MSG dalam memperkuat infrastruktur kepolisian dan kapabilitas penegakan hukum. Mendesain dan melaksanakan program pelatihan bersama untuk meningkatkan kemampuan operasional kepolisian di negara-negara MSG, termasuk teknik investigasi, pengelolaan data kejahatan, dan respon darurat.

5) Dukungan dalam Forum Internasional. Polri mewakili dan mendukung posisi negara-negara MSG dalam forum internasional, terutama dalam isu yang mempengaruhi kawasan Pasifik. Bekerja sama dengan negara-negara MSG untuk membentuk koalisi atau kelompok pendukung dalam isu global yang mempengaruhi kepentingan bersama, seperti perubahan iklim, keamanan laut, dan kejahatan siber.

6) Pendekatan Berbasis Kepercayaan dan Transparansi. Polri menekankan pentingnya kepercayaan dan transparansi dalam setiap aspek kerjasama keamanan. Hal ini termasuk kejujuran dalam berbagi informasi, keterbukaan tentang niat, dan komitmen untuk menghormati kedaulatan negara. Menyediakan mekanisme untuk evaluasi bersama dan feedback mengenai program dan inisiatif yang sudah berjalan, guna memastikan bahwa kerjasama terus relevan dan bermanfaat bagi semua pihak.

Penguatan hubungan bilateral dan multilateral melalui strategi-strategi ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra kunci di kawasan Pasifik, meningkatkan stabilitas regional, dan memastikan bahwa kepentingan keamanan nasional Indonesia terjaga dengan efektif.

d. Kerja Sama dalam Manajemen Krisis dan Bencana.

Strategi kerja sama dalam manajemen krisis dan bencana alam merupakan elemen penting dalam diplomasi Polri terhadap negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) untuk mendukung kepentingan nasional Indonesia. Kawasan Melanesia sering terkena dampak bencana alam seperti siklon tropis, gempa bumi, dan tsunami, yang menuntut kerja sama regional yang efektif untuk mitigasi, persiapan, dan respons bencana. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dioptimalkan:

1) Pembentukan Protokol dan Mekanisme Respons Bersama. Polri membangun atau memperkuat protokol bersama untuk respons bencana antarnegara anggota MSG. Ini mencakup pengaturan tentang bagaimana negara-negara akan berkoordinasi, berbagi sumber daya, dan menyediakan bantuan satu sama lain saat terjadi bencana. Selain

itu melaksanakan latihan bersama secara teratur yang mensimulasikan berbagai skenario bencana untuk meningkatkan kesiapan dan memperbaiki koordinasi antarnegara.

2) **Pertukaran Informasi dan Teknologi.** Polri mengembangkan atau mengintegrasikan sistem peringatan dini lintas negara yang memanfaatkan teknologi terkini untuk memonitor ancaman bencana alam dan menyebarkan peringatan secara efektif dan tepat waktu. Menciptakan database regional yang berisi informasi tentang risiko bencana, sumber daya yang tersedia, dan kontak penting untuk mempermudah koordinasi saat terjadi bencana.

3) **Kapasitas Bangunan dan Pelatihan Bersama.** Polri menyelenggarakan workshop dan pelatihan bersama yang fokus pada pembangunan kapasitas lokal untuk manajemen bencana, termasuk pelatihan dalam pengelolaan logistik bencana, penilaian kerusakan, dan pemulihan pasca-bencana. Selain itu memberikan bantuan teknis dan sumber daya seperti peralatan, tenaga ahli, dan teknologi kepada negara-negara anggota MSG yang membutuhkan peningkatan kapabilitas manajemen bencana.

4) **Kerjasama Penelitian dan Pengembangan.** Polri mendorong dan mendanai penelitian bersama mengenai mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim yang relevan dengan kawasan Melanesia. Selain itu melakukan kolaborasi dalam pengembangan teknologi baru atau ditingkatkan yang dapat digunakan untuk memperbaiki respons dan pemulihan bencana, seperti drone untuk penilaian kerusakan atau sistem komunikasi darurat yang lebih tahan banting.

5) **Dukungan dalam Forum Internasional dan Advocacy.** Polri mendukung negara-negara anggota MSG dalam forum internasional untuk mendapatkan akses ke lebih banyak sumber daya, bantuan, dan teknologi bencana. Selain itu beradvokasi untuk kebijakan atau regulasi internasional yang mendukung peningkatan kerjasama dan efisiensi dalam manajemen bencana di kawasan.

6) Pembangunan Ketahanan dan Reduksi Risiko Bencana. Polri perlu mengembangkan program yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana di kawasan Melanesia, seperti reboisasi, pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, dan pendidikan masyarakat tentang risiko bencana. Selain itu membantu membangun kapasitas komunitas lokal di negara-negara anggota MSG untuk menghadapi bencana, termasuk melalui pembangunan sistem dukungan masyarakat yang efektif.

Melalui strategi-strategi ini, Polri tidak hanya meningkatkan kemampuan regional dalam menghadapi bencana, tetapi juga memperkuat hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara anggota MSG, menunjukkan kepemimpinan Indonesia, dan mendukung kepentingan nasional Indonesia di kawasan.

e. Peningkatan Kerja Sama Teknis dan Pengembangan Kapasitas

Strategi peningkatan kerja sama teknis dan pengembangan kapasitas dalam konteks optimasi diplomasi Polri terhadap negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) adalah aspek krusial untuk mendukung kepentingan nasional Indonesia. Ini melibatkan memperkuat kemampuan institusional dan operasional kepolisian di negara-negara MSG, yang tidak hanya meningkatkan keamanan regional tetapi juga memperdalam hubungan bilateral dan multilateral. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diimplementasikan:

1) Pelatihan dan Pendidikan Bersama

- a) Polri menyelenggarakan program pertukaran pelatihan yang memungkinkan personel kepolisian dari negara-negara MSG untuk mengikuti pelatihan di akademi kepolisian Indonesia dan sebaliknya. Pelatihan bisa mencakup teknik investigasi kriminal, manajemen keamanan siber, dan taktik anti-terorisme.
- b) Polri mengadakan workshop dan seminar reguler untuk membahas isu-isu terkini dan memperkenalkan teknologi baru serta metodologi penegakan hukum yang efektif.

- 2) Peningkatan Infrastruktur dan Sumber Daya
 - a) Polri memberikan bantuan teknis untuk pengembangan infrastruktur kepolisian di negara-negara MSG, seperti sistem komunikasi kepolisian, pusat data, dan fasilitas pelatihan.
 - b) Polri menyediakan peralatan kepolisian yang diperlukan, seperti peralatan forensik atau IT, yang bisa memperkuat kapasitas kepolisian di negara-negara MSG untuk menangani kejahatan secara lebih efisien.
- 3) Pengembangan Kapasitas dan Konsultasi
 - a) Polri menyediakan konsultasi ahli untuk membantu kepolisian di negara-negara MSG dalam meningkatkan manajemen dan operasional mereka, termasuk peningkatan tata kelola dan kepatuhan terhadap standar internasional.
 - b) Polri mendorong kerja sama riset dan pengembangan antara institusi penelitian kepolisian Indonesia dengan mitra MSG untuk memajukan praktik penegakan hukum dan strategi keamanan.
- 4) Kerja Sama dalam Penanganan Kejahatan Transnasional
 - a) Polri mengembangkan inisiatif bersama untuk mengatasi isu kejahatan transnasional, seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan kejahatan siber, yang memerlukan koordinasi dan kerjasama lintas batas.
 - b) Polri membangun atau mengintegrasikan sistem informasi kejahatan untuk mempermudah pertukaran informasi dan data kejahatan antar negara anggota MSG.
- 5) Pendukung Kapasitas Respons Darurat dan Bencana
 - a) Polri menyelenggarakan pelatihan manajemen bencana untuk kepolisian di negara-negara MSG, mengingat wilayah ini sering terkena dampak bencana alam.
 - b) Polri menginisiasi pembentukan unit respons darurat bersama yang dapat beroperasi lintas negara dalam situasi darurat atau bencana.

- 6) Peningkatan Kerja Sama Cyber dan Teknologi
 - a) Polri menyediakan pelatihan keamanan siber dan membangun kapasitas untuk melawan kejahatan cyber, yang menjadi tantangan global yang semakin meningkat.
 - b) Polri membantu negara-negara MSG dalam membangun dan meningkatkan infrastruktur teknologi informasi mereka yang digunakan untuk penegakan hukum dan keamanan publik.

Strategi ini menekankan pentingnya kerja sama teknis dan pembangunan kapasitas sebagai fondasi untuk menciptakan keamanan yang berkelanjutan dan memperdalam hubungan kerjasama antara Indonesia dan negara-negara anggota MSG. Melalui inisiatif tersebut, Polri tidak hanya memperkuat keamanan nasional tetapi juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjadi mitra responsif dalam mendukung stabilitas regional.

16. Upaya Optimalisasi diplomasi Polri terhadap negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) guna mendukung kepentingan nasional Indonesia

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dijelaskan bahwa dalam UU ini mengatur peran, fungsi, dan wewenang Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Polri juga diberi tugas untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang keamanan dalam negeri serta berpartisipasi dalam kebijakan luar negeri negara, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanganan ancaman transnasional yang mempengaruhi stabilitas nasional.

Menurut UU No. 2/2002, Polri juga memiliki kapasitas untuk membantu negara-negara lain dalam membangun kekuatan kepolisian mereka. Melalui program-program pelatihan dan pembangunan kapasitas, Polri dapat memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara MSG, sekaligus meningkatkan kapabilitas regional dalam menangani ancaman keamanan. Dengan Papua sebagai isu sensitif dalam hubungan dengan beberapa negara MSG, Polri dapat

berperan aktif dalam diplomasi yang mengedepankan narasi Indonesia tentang pembangunan dan integrasi Papua. Ini meliputi menginformasikan upaya-upaya pembangunan yang dilakukan, serta komitmen Indonesia terhadap peningkatan kesejahteraan dan hak asasi manusia di wilayah tersebut.

Terkait kepentingan nasional Indonesia di Papua, sebagaimana Hans J. Morgenthau mendefinisikan kepentingan nasional dalam kerangka realisme politik, di mana negara-negara bertindak atas dasar kepentingan kekuasaannya. Kepentingan nasional diinterpretasikan sebagai kekuasaan dan keamanan sebuah negara, yang harus dipertahankan atau ditingkatkan melalui berbagai cara, termasuk diplomasi. Morgenthau menekankan pentingnya kebijakan luar negeri yang pragmatis dan berbasis pada realitas kekuatan relatif dan kepentingan antar negara.

Mengingat keamanan adalah elemen penting dari kepentingan nasional sesuai Morgenthau, Polri dapat memperkuat kerja sama keamanan dengan negara-negara MSG. Ini meliputi kerja sama dalam pencegahan dan penanganan kejahatan transnasional, terorisme, dan isu-isu keamanan lainnya yang berpotensi mengganggu stabilitas regional. Polri bisa memanfaatkan forum-forum multilateral dengan negara-negara MSG untuk membangun kesepahaman dan kerja sama. Melalui diplomasi berbilang pihak, Polri dapat membantu memformulasikan dan mempengaruhi agenda regional yang mendukung kepentingan nasional Indonesia, seperti stabilitas politik dan ekonomi serta keamanan maritim. Selaras dengan teori Morgenthau tentang penggunaan kekuasaan secara efektif, Polri dapat menggunakan elemen-elemen soft power seperti program bantuan kemanusiaan, pendidikan, dan pertukaran budaya untuk mempengaruhi negara-negara MSG secara positif dan memperkuat posisi Indonesia di kawasan. Melalui implementasi strategi-strategi tersebut, Polri tidak hanya mendukung keamanan dan stabilitas nasional tetapi juga membantu memperluas pengaruh dan kekuasaan Indonesia di kawasan Pasifik, sesuai dengan teori kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Morgenthau.

Oleh karena itu, berikut adalah beberapa upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam diplomasi Polri terhadap negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) untuk mendukung kepentingan nasional Indonesia:

a. Peningkatan Kerjasama Keamanan.

Peningkatan kerjasama keamanan merupakan salah satu pilar strategis dalam upaya optimalisasi diplomasi Polri terhadap negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) untuk mendukung kepentingan nasional Indonesia. Kerjasama keamanan kepolisian secara internasional telah dilakukan melalui *the International Criminal Police Organization (ICPO-INTERPOL)*, yaitu organisasi *inter-governmental* yang beranggotakan 196 negara untuk saling bekerjasama supaya dunia menjadi lebih aman dari kejahatan. Pada masing-masing negara anggota, dibentuk *National Central Bureau (NCB)* yang menjadi penghubung antara ICPO dengan negara anggota dan sekaligus penghubung antar negara-negara anggota.³⁵

Kerjasama keamanan ini dapat dipererat secara bilateral antara negara anggota apabila dipandang perlu karena adanya kebutuhan untuk menjaga keamanan dan kepentingan masing-masing negara. Oleh karena itu, Polri juga melakukan kerjasama secara bilateral dengan negara yang dianggap penting untuk mendukung keamanan dan kepentingan Indonesia. Salah satunya adalah kerjasama bilateral dengan negara anggota MSG.

Berikut ini adalah beberapa aspek penting dari peningkatan kerjasama keamanan tersebut:

1) Pengembangan Kapasitas dan Pelatihan Bersama.

Peningkatan kerjasama keamanan sering melibatkan program pelatihan bersama dan pengembangan kapasitas yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan isu-isu keamanan lintas batas. Melalui pelatihan ini, Polri dan kepolisian negara-negara MSG dapat bertukar pengetahuan dan praktik terbaik, serta meningkatkan keahlian yang diperlukan untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks dan dinamis.

2) Pertukaran Informasi dan Intelijen.

Kerjasama keamanan juga mengharuskan adanya pertukaran informasi dan intelijen yang efektif antara Indonesia dan negara-negara MSG. Pertukaran ini vital untuk

³⁵ INTERPOLWebsite melalui <https://www.interpol.int/en/Who-we-are/What-is-INTERPOL>, diakses pada 29 Juni 2024.

mengidentifikasi dan menanggapi ancaman keamanan dengan lebih cepat dan akurat. Peningkatan mekanisme pertukaran informasi ini membantu membangun sistem peringatan dini dan memfasilitasi koordinasi yang lebih baik dalam menanggapi insiden keamanan, serta menguatkan jaringan antar lembaga keamanan di kawasan.

3) Operasi Keamanan Gabungan. Pelaksanaan operasi keamanan gabungan antara Polri dan agen keamanan negara anggota MSG merupakan langkah konkret dalam kerjasama keamanan. Operasi bersama ini tidak hanya memperkuat kapasitas operasional tetapi juga memperlihatkan solidaritas dan komitmen bersama dalam memerangi kejahatan lintas negara. Operasi semacam ini sering kali difokuskan pada isu spesifik seperti penangkapan sindikat narkoba, penanganan penyelundupan manusia, atau operasi anti-piracy.

4) Diplomasi Keamanan. Pada level yang lebih strategis, peningkatan kerjasama keamanan juga melibatkan diplomasi keamanan, di mana Polri berperan dalam memfasilitasi dan meningkatkan dialog keamanan antara Indonesia dan negara-negara MSG. Melalui forum dan pertemuan bilateral atau multilateral, Polri dapat menyuarakan isu-isu keamanan yang menjadi prioritas, serta menjajaki kerjasama lebih lanjut dalam rangka memperkuat stabilitas regional.

Upaya-upaya ini mendukung kepentingan nasional Indonesia dengan cara memastikan bahwa wilayah sekitarnya aman dan stabil, yang pada gilirannya memungkinkan Indonesia untuk menjaga kedaulatan nasionalnya, melindungi warganya, dan memperluas pengaruhnya di kawasan Pasifik. Selain itu, kerjasama keamanan yang efektif ini juga membantu Indonesia dalam mengurangi dan mengelola isu-isu sensitif seperti gerakan separatisme di Papua dengan cara yang lebih diplomatis dan konstruktif.

b. Diplomasi Multidimensi.

Peningkatan kerjasama dalam diplomasi multidimensi merupakan strategi penting yang diadopsi oleh Polri untuk optimalisasi hubungan dengan negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG),

mendukung kepentingan nasional Indonesia. Strategi ini mencakup aspek-aspek keamanan, ekonomi, budaya, dan pendidikan, yang semuanya bersinergi untuk membentuk hubungan yang lebih dalam dan lebih bermanfaat. Berikut ini adalah beberapa cara utama melalui mana peningkatan kerjasama diplomasi multidimensi dapat dilaksanakan:

1) Kerjasama Kebudayaan dan Pendidikan. Diplomasi multidimensi mencakup peningkatan pertukaran kebudayaan dan pendidikan, yang dapat membantu memperdalam pemahaman dan apresiasi bersama antara Indonesia dan negara-negara MSG. Program pertukaran pelajar, beasiswa, serta festival kebudayaan bersama dapat memperkuat tali persaudaraan dan membangun jembatan pemahaman antarkomunitas di negara-negara tersebut. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat hubungan interpersonal, tetapi juga membuka pintu untuk kerjasama lebih lanjut dalam berbagai bidang lainnya.

2) Diplomasi Ekonomi. Peningkatan kerjasama ekonomi melalui inisiatif perdagangan dan investasi merupakan aspek penting dari diplomasi multidimensi. Dengan memanfaatkan kerjasama ini, Polri dapat membantu mempromosikan Indonesia sebagai partner dagang dan investasi yang atraktif bagi negara-negara MSG. Melalui kegiatan ini, Polri tidak hanya membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi di negara-negara MSG, menciptakan situasi win-win yang dapat meredakan ketegangan politik dan meningkatkan kerjasama bilateral.

3) Kolaborasi di Bidang Keamanan dan Hukum. Di samping ekonomi dan budaya, peningkatan kerjasama di bidang keamanan tetap menjadi tulang punggung diplomasi multidimensi. Melalui kerjasama ini, Polri berupaya mengembangkan kerangka kerja sama hukum dan keamanan yang lebih kuat dengan negara-negara MSG. Ini mencakup pelatihan bersama, pertukaran informasi, dan koordinasi dalam penanganan kejahatan lintas batas dan keamanan maritim. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat keamanan regional tetapi juga

menunjukkan komitmen Indonesia dalam membangun kawasan Pasifik yang lebih aman dan damai.

Dengan meningkatkan kerjasama dalam diplomasi multidimensi, Polri tidak hanya mendukung kepentingan nasional Indonesia dalam menjaga keamanan dan stabilitas regional tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin regional yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan dan tantangan di kawasan Pasifik. Ini, pada gilirannya, meningkatkan pengaruh dan reputasi Indonesia di mata dunia internasional, mendukung aspirasi Indonesia di forum global.

c. **Menggunakan Forum Internasional.**

Peningkatan kerjasama menggunakan forum internasional adalah salah satu strategi yang efektif untuk optimalisasi diplomasi Polri terhadap negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) dalam mendukung kepentingan nasional Indonesia. Strategi ini melibatkan keikutsertaan aktif Polri dalam berbagai platform multilateral yang membahas isu-isu regional dan global, yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap kepentingan Indonesia. Berikut adalah beberapa aspek penting dari strategi ini:

1) Aktif dalam Pertemuan dan Konferensi Keamanan. Polri dapat memanfaatkan forum-forum internasional seperti pertemuan ASEANAPOL, Interpol, atau konferensi keamanan regional lainnya untuk membangun dan memperkuat jaringan dengan negara-negara MSG. Partisipasi aktif dalam pertemuan-pertemuan ini memungkinkan Polri untuk membagikan best practices, belajar dari pengalaman negara lain, dan mempromosikan kerjasama dalam isu-isu seperti terorisme, kejahatan siber, dan kejahatan transnasional lainnya. Ini juga merupakan kesempatan untuk memahami kebutuhan dan prioritas keamanan negara-negara MSG, yang bisa membantu dalam merumuskan pendekatan yang lebih terarah dan efektif.

2) Penggunaan Platform Multilateral untuk Advokasi. Dengan mengambil peran lebih aktif dalam forum internasional, Polri tidak hanya meningkatkan kapasitas dan visibilitasnya tetapi juga dapat

mempengaruhi pembentukan norma dan kebijakan keamanan internasional yang mendukung kepentingan Indonesia. Misalnya, dalam konteks isu Papua, Polri dapat memanfaatkan forum internasional untuk menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam mempromosikan pembangunan dan keadilan sosial di Papua, sekaligus menangkal narasi yang tidak menguntungkan yang mungkin diadvokasi oleh pihak-pihak tertentu dalam MSG.

3) Kolaborasi dalam Pengembangan Standar dan Protokol Keamanan. Keikutsertaan dalam forum internasional juga membuka peluang bagi Polri untuk berkolaborasi dalam pengembangan standar dan protokol keamanan internasional. Hal ini sangat penting dalam konteks keamanan siber dan perlindungan data, di mana kerjasama internasional dapat memperkuat sistem keamanan nasional. Dengan bekerja sama dalam penyusunan standar dan best practices, Polri dapat memastikan bahwa kebijakan dan praktik keamanan Indonesia sejalan dengan standar internasional, meningkatkan efektivitasnya dalam menghadapi ancaman global.

Melalui peningkatan kerjasama di forum internasional, Polri tidak hanya memperkuat kerjasama keamanan bilateral dan multilateral dengan negara-negara MSG tetapi juga menegaskan komitmen Indonesia terhadap kerjasama internasional dan multilateralisme. Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa Indonesia dan negara-negara MSG dapat bersama-sama menghadapi tantangan keamanan yang kian kompleks di era globalisasi ini.

d. Mengatasi Persepsi Negatif.

Polri harus secara aktif mengatasi persepsi negatif terkait dengan tindakan Indonesia di Papua dengan menyampaikan fakta dan informasi yang akurat tentang upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk pembangunan dan kesejahteraan di Papua. Strategi komunikasi yang efektif dan transparan ini akan membantu mengurangi dukungan internasional terhadap gerakan separatisme dan meningkatkan pemahaman

tentang komitmen Indonesia terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa cara yang bisa dilakukan:

1) Meningkatkan Dialog dan Pertukaran Informasi. Polri dapat meningkatkan dialog dan pertukaran informasi dengan kepolisian negara anggota MSG. Ini mencakup berbagai aspek seperti keamanan, penanganan kejahatan transnasional, dan terorisme. Dialog yang efektif dapat memperkuat hubungan dan membangun kepercayaan.

2) Program Pelatihan Bersama. Melakukan pelatihan bersama atau workshop yang melibatkan anggota kepolisian dari negara-negara MSG. Hal ini tidak hanya memperkuat kemampuan teknis dan operasional tetapi juga mempererat hubungan interpersonal antar agen penegak hukum.

3) Kerjasama Intelijen. Meningkatkan kerjasama intelijen untuk memerangi kejahatan lintas negara seperti perdagangan narkoba dan penyelundupan manusia. Kerjasama ini bisa meliputi pertukaran data dan strategi penanganan yang efektif.

4) Dukungan terhadap Inisiatif Regional. Polri bisa mendukung atau bahkan memprakarsai inisiatif-inisiatif regional yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama keamanan di kawasan Pasifik. Dukungan ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperkuat kestabilan regional.

5) Diplomasi Publik dan Kebudayaan. Memanfaatkan diplomasi publik dan kebudayaan untuk membangun citra positif Indonesia. Kegiatan-kegiatan seperti festival budaya, kunjungan budaya, dan program pertukaran pelajar dapat membantu memperbaiki persepsi negatif dan meningkatkan pemahaman lintas budaya.

6) Mengadakan Forum Bilateral dan Multilateral. Mengadakan forum atau pertemuan bilateral dan multilateral yang melibatkan Polri dan kepolisian negara-negara MSG. Forum ini bisa menjadi wadah untuk mendiskusikan isu-isu keamanan bersama dan menemukan solusi bersama.

7) Transparansi dan Komunikasi yang Baik. Memastikan bahwa semua kegiatan kerjasama dilakukan dengan transparansi dan komunikasi yang baik untuk menghindari kesalahpahaman. Hal ini penting untuk membangun dan mempertahankan hubungan jangka panjang yang positif.

Melalui upaya-upaya tersebut, diplomasi Polri terhadap negara anggota MSG bisa dioptimalkan, yang tidak hanya memperkuat hubungan bilateral dan multilateral, tetapi juga secara aktif mendukung kepentingan nasional Indonesia dalam menjaga stabilitas dan keamanan regional.

e. Kolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga Lain.

Optimalisasi diplomasi Polri juga memerlukan koordinasi yang kuat dengan Kementerian Luar Negeri dan lembaga pemerintah lainnya untuk memastikan konsistensi dan efektivitas pendekatan Indonesia. Sinergi antar-lembaga ini penting untuk mengintegrasikan berbagai aspek kebijakan luar negeri dan menjamin bahwa semua upaya diplomasi mendukung tujuan nasional yang lebih luas. Berikut adalah beberapa strategi peningkatan kerja sama kolaboratif antarlembaga:

1) Pembentukan Satuan Tugas Bersama. Membentuk satuan tugas atau tim kerja bersama yang melibatkan Polri dan kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Badan Intelijen Negara. Satuan tugas ini dapat berfokus pada pencapaian tujuan diplomasi spesifik dan mengkoordinasikan kebijakan serta tindakan.

2) Integrasi Kebijakan. Mengintegrasikan kebijakan antarlembaga untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan diplomasi dan cara mencapainya. Hal ini termasuk menyelaraskan strategi keamanan, perdagangan, dan kebijakan luar negeri.

3) Program Pelatihan dan Kapasitas Bersama. Mengadakan program pelatihan bersama yang melibatkan Polri dan lembaga lain untuk meningkatkan kemampuan diplomasi dan pengetahuan tentang

isu-isu regional yang berkaitan dengan negara-negara MSG. Program ini bisa mencakup pembelajaran tentang budaya, politik, dan masalah sosial di negara-negara anggota MSG.

4) Penyelarasan Agenda Internasional. Bekerjasama dalam forum internasional dan pertemuan multilateral. Ini melibatkan koordinasi posisi dan strategi di forum internasional yang membahas isu Pasifik, seperti Pertemuan Tingkat Tinggi Pasifik atau forum ASEAN yang terkait.

5) Kolaborasi dalam Proyek Pembangunan. Bekerjasama dalam proyek pembangunan yang ditujukan untuk negara-negara MSG. Proyek-proyek ini bisa melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan bantuan dalam infrastruktur, kesehatan, atau pendidikan.

6) Komunikasi dan Diseminasi Informasi. Menyusun mekanisme komunikasi yang efektif antarlembaga untuk memastikan informasi terkini dan relevan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat. Ini penting untuk respons yang cepat dan efektif terhadap perkembangan situasi di negara-negara MSG.

7) Kerja Sama Keamanan Regional. Mengkoordinasikan upaya keamanan regional dengan Kementerian Pertahanan dan lembaga keamanan lainnya untuk memperkuat kapasitas Polri dalam menghadapi tantangan keamanan yang bersifat regional dan transnasional.

8) Advokasi dan Diplomasi Publik. Melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk strategi advokasi dan diplomasi publik guna memperkuat citra Indonesia dan menyebarkan informasi positif tentang upaya diplomasi di kawasan MSG.

Melalui kolaborasi yang erat antara Polri dan kementerian/lembaga lain, Indonesia dapat lebih efektif dalam mewujudkan tujuan diplomasi dan

keamanannya, serta meningkatkan pengaruh dan kepentingan nasionalnya di kawasan Pasifik.



BAB IV

PENUTUP

17. Simpulan

- a. Saat ini kondisi diplomasi Polri terhadap Melanesian Spearhead Group (MSG) terfokus pada peningkatan kerjasama keamanan dan penegakan hukum serta pembangunan pemahaman dan kepercayaan yang lebih baik. Kerjasama yang dilakukan bersifat bilateral dan multilateral, misalkan lewat perjanjian antar kepolisian, terlibat aktif serta menjadi tuan rumah pertemuan-pertemuan terkait kerjasama kepolisian, dan berkontribusi secara finansial. Diplomasi tersebut menghadapi beberapa permasalahan terutama terkait dengan isu konflik internal di Papua dan sikap beberapa negara anggota MSG yang bersimpati kepada OPM/ULMWP.
- b. Diplomasi Polri terhadap negara-negara anggota Melanesian Spearheads Group (MSG) dipengaruhi oleh berbagai faktor yang meliputi dinamika internal Indonesia, kondisi regional, dan kondisi global. Utamanya adalah isu internal Papua, kapabilitas dan sumber daya Polri, peran dan pengaruh eksternal, kebijakan luar negeri Indonesia, kerjasama keamanan regional, serta perubahan social dan politik di negara-negara MSG.
- c. Diplomasi Polri terhadap negara-negara anggota Melanesian Spearheads Group (MSG) mengandalkan pendekatan yang beragam dan komprehensif, bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral dan multilateral serta meningkatkan kerja sama keamanan regional. Strategi ini meliputi kerja sama keamanan yang lebih terintegrasi, diplomasi publik dan *soft power*, penguatan hubungan bilateral dan multilateral, kerja sama dalam manajemen krisis dan bencana, serta peningkatan kerja sama teknis dan pengembangan kapasitas.
- d. Optimalisasi diplomasi Polri terhadap Melanesian Spearhead Group (MSG) merupakan langkah strategis yang mendukung kepentingan nasional Indonesia dalam memperkuat stabilitas, keamanan, dan pengaruh di kawasan Pasifik. Melalui kerjasama keamanan yang ditingkatkan, termasuk

pertukaran intelijen, pelatihan bersama, dan operasi gabungan, Polri tidak hanya memperkuat kapasitas penanganan isu transnasional, tetapi juga membangun kepercayaan dan kerjasama yang lebih dalam dengan negara-negara anggota MSG. Pendekatan diplomasi multidimensi, yang melibatkan kerjasama ekonomi, budaya, dan pendidikan, membantu mendiversifikasi dan memperdalam hubungan bilateral, mengurangi ketegangan dan memperbaiki persepsi terhadap Indonesia, khususnya terkait isu sensitif seperti Papua.

e. Optimalisasi diplomasi terhadap negara anggota MSG penting untuk dilakukan karena Indonesia harus menjaga kepentingan nasional, yaitu menjaga kedaulatan NKRI. Sementara itu, Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) masih terus melakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya mencari dukungan dari dunia internasional, yang tentunya sangat merugikan Indonesia. Oleh karena itu, optimalisasi diplomasi ini dilakukan agar:

- 1) dapat mempengaruhi negara anggota MSG supaya menghormati kedaulatan NKRI dan tidak memberikan dukungan kepada OPM/ULMWP;
- 2) menekan penyampaian isu pelanggaran HAM di Papua oleh negara anggota MSG pada forum internasional;
- 3) memberikan atmosfer yang baik kepada pemerintah Indonesia untuk fokus melaksanakan program percepatan pembangunan di Papua.

18. Rekomendasi

a. Polri harus memperkuat dialog dan kerjasama bilateral dengan masing-masing negara anggota MSG untuk memahami lebih dalam kebutuhan dan prioritas mereka. Melalui kerjasama yang lebih erat, Polri dapat mengidentifikasi area kerjasama yang saling menguntungkan, terutama dalam hal keamanan, hukum, dan pencegahan kejahatan.

- b. Polri agar meningkatkan fokus pada pelatihan bersama dan pembangunan kapasitas adalah penting untuk menguatkan hubungan keamanan. Polri dapat menawarkan program pelatihan yang memanfaatkan keahlian khusus yang dimiliki Indonesia dalam penanganan terorisme, kejahatan siber, dan keamanan maritim untuk meningkatkan kemampuan negara-negara MSG.
- c. Polri harus lebih aktif menggunakan platform multilateral untuk mempromosikan kebijakan Indonesia dan mengadvokasi isu-isu yang menjadi prioritas nasional, seperti stabilitas keamanan regional dan penanganan isu Papua. Keikutsertaan dalam forum internasional akan membantu Indonesia membentuk narasi global dan mendukung posisi politiknya di kawasan.
- d. Polri perlu memastikan sinergi yang kuat dengan Kementerian Luar Negeri dan lembaga pemerintahan lainnya untuk memastikan bahwa inisiatif keamanan terintegrasi dengan baik dalam kebijakan luar negeri yang lebih luas. Koordinasi ini akan memastikan bahwa kebijakan dan tindakan Polri mendukung tujuan diplomasi keseluruhan Indonesia dan menonjolkan Indonesia sebagai pemain kunci di kawasan.
- e. Polri perlu menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas diplomasi dan memahami serta menguasai permasalahan dalam hubungan dengan negara-negara anggota MSG.
- f. Polri perlu secara rutin mengevaluasi efektivitas strategi diplomasi yang dilakukan terhadap MSG dan mengadaptasinya berdasarkan dinamika regional dan global yang berubah. Evaluasi ini akan membantu mengidentifikasi keberhasilan dan area yang memerlukan peningkatan, memungkinkan untuk penyesuaian strategi yang tepat waktu dan relevan dengan kondisi terkini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU REFERENSI

- Gonggong, Dr. Anhar dan Zuhdi, SS. MS., Susanto (1995). *Sejarah Perjuangan Rakyat Timor Timur, Untuk Sekolah Menengah Umum*. Cetakan ketiga. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Proyek SLTP (Induk) Timor Timur Tahun Anggaran 1995/1996.
- Ibrahim, Muhammad, Arifin, M, Sulaiman, Nasruddin, Sufi, Rusdi, Ahmad, Zakaria, Ambary, Hasan Ma'arif, Alfian MA, T. Ibrahim (1991). *Sejarah Daerah Propinsi Istimewa Aceh*. Cetakan kedua. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta
- Nye, Joseph S. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs.
- Webster, D., (Editor). *Flowers in the Wall: Truth and Reconciliation in Timor-Leste, Indonesia, and Melanesia*. Calgary, Alberta: University of Calgary Press.
- Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Pendekatan, Jenis, dan Metode Penelitian Pendidikan*.
- Tim Pokja Bahan Ajar SBS. UUD NRI Tahun 1945 (2024). *Bidang Studi Empat Konsensus Dasar Bangsa (Sub Bidang Studi UUD NRI 1945)*. Jakarta: Lemhannas RI.
- Tim Pokja Bahan Ajar BS. Padnas (2024). *Bidang Studi: Kewaspadaan Nasional*. Jakarta: Lemhannas RI

JURNAL

- Adi, Yesica Putri Prisilia Angeli, Karisoh, Fernando J.M.M., Voges, Stefan O. (2022). "Hubungan Diplomatik Indonesia dan Vanuatu terkait dengan Pernyataan Vanuatu Mendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM). *Lex Privatum*, Vol.10 No. 5.

- Aksoy, M. (2018). "Redefining Diplomacy In The 21st Century & Examining The Characteristics Of An Ideal Diplomat". *Manas Journal of Social Studies*, Vol. 7 (3).
- Ningsih, T.W., Rudiawan, B., Sianturi, D. (January 2023). "Analysis Of United States' Foreign Policy Towards Indonesia: From Freedom To Freeport In West Papua", *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, Vol. 36 No. 2.
- Nurika, Rizki Rahmadidi (2017). "Peran Globalisasi di Balik Munculnya Tantangan Baru Bagi Diplomasi di Era Kontemporer". *Jurnal Sospol*, Vol.3 No.1.
- Suropati, U. (2019). "Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru: Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai, Adil, dan Bermartabat". *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Edisi 37. H. 79-80.
- Temaluru, T.B.P. (2016). "Kepentingan Vanuatu Dalam Usaha Pemerdekaan Papua". *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 5 No. 2. H.574
- Yani, Y.M., Lusiana, E. (2018). "Soft Power dan Soft Diplomacy". *Jurnal TAPIs*, Vol. 14 (2).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
- Undang-undang RI No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- Undang-undang RI No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
- Peraturan Menteri Pertahanan RI No. 25 Tahun 2014 tentang Doktrin Pertahanan Negara.
- Peraturan Menteri Pertahanan RI No. 25 Tahun 2014 tentang Intelijen Negara.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

SUMBER LAIN

ABC News. *Indonesia admitted to Melanesian Spearhead Group, West Papuan group given observer status*, dalam <https://www.abc.net.au/news/2015-06-25/indonesia-admitted-to-melanesian-intergovernmental-group/6573968>, diakses pada 13 Juli 2024.

CNN Indonesia. *Warga Papua Gelar Aksi 1 Desember di Jakarta dan Makassar*, melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231201110526-12-1031466/warga-papua-gelar-aksi-1-desember-di-jakarta-dan-makassar>, diakses 18 Februari 2024.

CNN Indonesia. *Kenapa PM Fiji Dukung Gerakan Papua Merdeka Benny Wenda*, melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230303081243-113-920185/kenapa-pm-fiji-dukung-gerakan-papua-merdeka-benny-wenda>, diakses 19 Februari 2024.

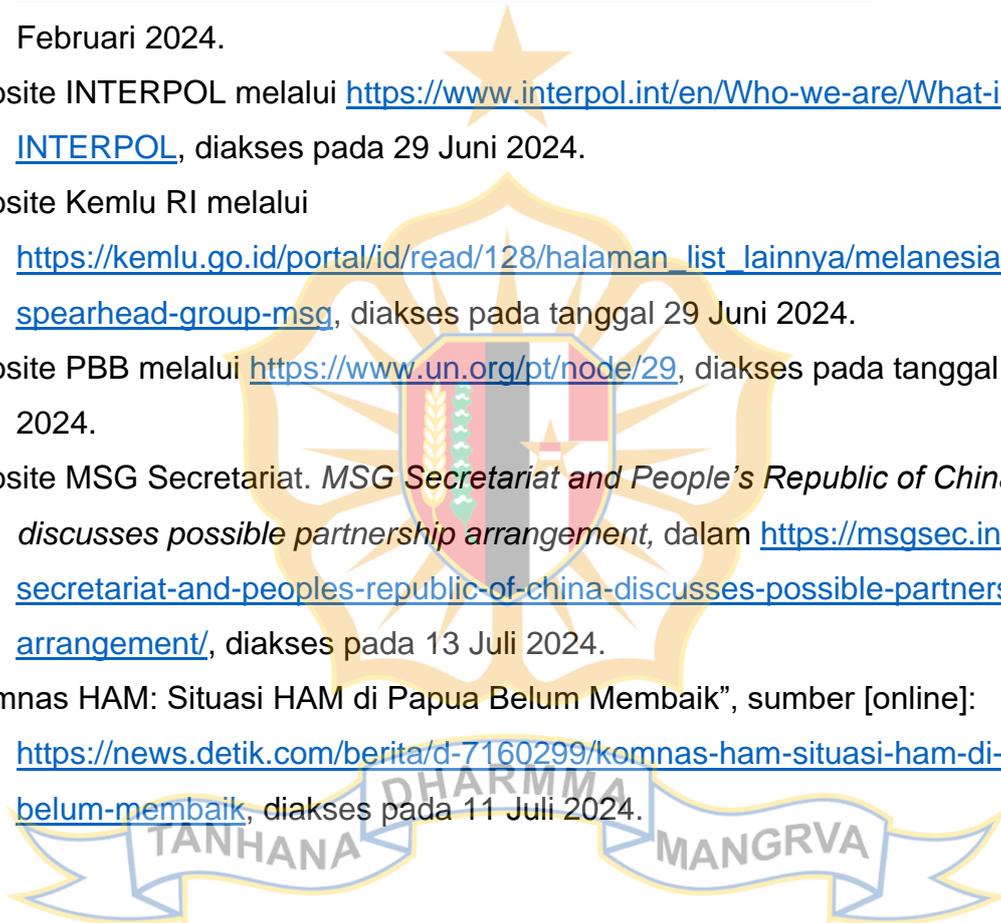
CNN Indonesia. *Beda Pendekatan Operasi Damai Cartenz dan Satgas Nemangkawi di Papua*, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220111104315-12-745089/beda-pendekatan-operasi-damai-cartenz-dan-satgas-nemangkawi-di-papua>, diakses pada 10 Juli 2024.

Costa, F.M.L *KKB Bakar Fasilitas 17 Sekolah di Papua dalam Tiga Tahun Terakhir*, dalam <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/08/18/kkb-bakar-fasilitas-17-sekolah-di-papua-dalam-tiga-tahun-terakhir>, diakses pada 11 Juli 2024.

- Encyclopaedia Britannica. *United Nations General Assembly*, melalui <https://www.britannica.com/topic/United-Nations-General-Assembly>, diakses pada 11 Juli 2024.
- Firmansyah, Heri. *Perpanjangan Operasi Damai Cartenz di Papua, Polri Diapresiasi*, dalam <https://www.rri.co.id/nasional/515285/perpanjangan-operasi-damai-cartenz-di-papua-polri-diapresiasi>, diakses pada 10 Juli 2024.
- Gao, X., Charlton, G.C. *Australia and New Zealand in the West Papua Conflict*. URL. <https://thediplomat.com/2023/04/australia-and-new-zealand-in-the-west-papua-conflict/>, diakses 29 Juni 2024
- Hamid, Usman. *Isu Papua dalam Dinamika Pasifik*, melalui <https://mediaindonesia.com/opini/608975/isu-papua-dalam-dinamika-pasifik>, diakses pada 29 Juni 2024.
- Harding, B. dan Camilla P. *China's Search for a Permanent Military Presence in the Pacific Islands*, <https://www.usip.org/publications/2022/07/chinas-search-permanent-military-presence-pacific-islands>, diakses pada 13 Juli 2024.
- Joku, Harlyne. *Perdana Menteri Fiji, PNG ditunjuk sebagai utusan khusus untuk Indonesia terkait Papua*, dalam <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/pm-fiji-png-utusan-khusus-indonesia-isu-papua-11092023142251.html>, diakses pada 14 Juli 2024.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Kantor Berita Antara. *Penanganan Gangguan KKB di Papua*, dalam <https://www.antaraneews.com/infografik/3899166/penanganan-gangguan-kkb-di-papua>, diakses pada 10 Juli 2024.
- Kemlu RI, *Status Indonesia di MSG dibarengi dengan Kerjasama Konkrit*, melalui <https://www.tabloiddiplomasi.org/status-indonesia-di-msg-dibarengi-dengan-kerjasama-konkrit/>, diakses pada tanggal 29 Juni 2024.
- Kingsbury, D. *Why you will never hear an Australian leader call out Indonesia on West Papua*. melalui <https://www.theguardian.com/australia-news/2023/sep/28/australia-west-papua-human-rights-abuse-allegations-indonesia>, diakses 29 Juni 2024.

- Koestanto, Benny D. (2021). *Vanuatu Kembali Soroti Isu HAM di Papua*. melalui <https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/09/26/vanuatu-kembali-soroti-isu-ham-di-papua>, diakses 19 Februari 2024
- KumparanNEWS. *Tidak Ada Negara Singgung Isu Papua pada Sidang Majelis Umum PBB 2023*, dalam <https://kumparan.com/kumparannews/tidak-ada-negara-singgung-isu-papua-pada-sidang-majelis-umum-pbb-2023-21HYzierQkm/full>, diakses pada 13 Juli 2024.
- Melanesian Spearhead Group. *Communique of 22nd MSG Leader's Summit*, dalam <https://msgsec.info/wp-content/uploads/documentsofcooperation/2023-Aug-23-24-22nd-MSG-Leaders-Summit-Communique.pdf>, diakses pada 14 Juli 2024.
- Sucahyo, Nurhadi. *Sawit di Papua: Tarik Menarik antara Masyarakat Adat dan Pemerintah*, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/sawit-di-papua-tarik-menarik-antara-masyarakat-adat-dan-pemerintah/7182818.html>, diakses pada 8 Juli 2024.
- Peake, G. dan Graeme S. *Solomon Islands: cops bearing gifts*, dalam <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/solomon-islands-cops-bearing-gifts>, diakses pada 13 Juli 2024.
- Perkasa, Vidhyandika D. *Papua dan Ekonomi Politik yang Destruktif*, dalam Kompas.id, 10 Juli 2023, diakses pada 8 Juli 2024.
- Ramdhani, Jabbar (2021). *Kibarkan Bendera Bintang Kejora di GOR Cenderawasih, 8 Orang Jadi Tersangka*. melalui <https://news.detik.com/berita/d-5837515/kibarkan-bendera-bintang-kejora-gor-cenderawasih-8-orang-jadi-tersangka>, diakses 18 Februari 2024
- Simanjuntak, Jonathan (2023). *Pilot Susi Air Disandera TPNPB – OPM, Dijadikan Jaminan Negosiasi Politik*, melalui <https://nasional.sindonews.com/read/1023187/14/pilot-susi-air-disandera-tpnpb-dijadikan-jaminan-negosiasi-politik-1676430162>, diakses 18 Februari 2024.
- Situs Resmi Pemerintah Aceh. *Sejarah Provinsi Aceh*, melalui <https://www.acehprov.go.id/halaman/sejarah-provinsi-aceh>. Diakses pada tanggal 7 April 2024.

- Tiah, Putri (2022). *Ras Melanesoid: Asal Usul, Ciri-ciri dan Contoh Sukunya*. melalui [https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6458819/ras-melanesoid-asal-usul-ciri-dan-contoh-sukunya#:~:text=Selain%20itu%2C%20peradaban%20dari%20bangsa,Papua%2C%20misalnya%20di%20Papua%20Nugini.](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6458819/ras-melanesoid-asal-usul-ciri-dan-contoh-sukunya#:~:text=Selain%20itu%2C%20peradaban%20dari%20bangsa,Papua%2C%20misalnya%20di%20Papua%20Nugini.,), “ diakses 19 Februari 2024
- Yanwardhana, Emir (2021). *Kronologi Vanuatu Serang RI di PBB & Sebut-sebut Papua*. melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210926132354-4-279234/kronologi-vanuatu-serang-di-pbb-sebut-sebut-papua>, diakses 19 Februari 2024.
- Website INTERPOL melalui <https://www.interpol.int/en/Who-we-are/What-is-INTERPOL>, diakses pada 29 Juni 2024.
- Website Kemlu RI melalui https://kemlu.go.id/portal/id/read/128/halaman_list_lainnya/melanesian-spearhead-group-msg, diakses pada tanggal 29 Juni 2024.
- Website PBB melalui <https://www.un.org/pt/node/29>, diakses pada tanggal 29 Juni 2024.
- Website MSG Secretariat. *MSG Secretariat and People’s Republic of China discusses possible partnership arrangement*, dalam <https://msgsec.info/msg-secretariat-and-peoples-republic-of-china-discusses-possible-partnership-arrangement/>, diakses pada 13 Juli 2024.
- “Komnas HAM: Situasi HAM di Papua Belum Membaik”, sumber [online]: <https://news.detik.com/berita/d-7160299/komnas-ham-situasi-ham-di-papua-belum-membaik>, diakses pada 11 Juli 2024.



**OPTIMALISASI DIPLOMASI TERHADAP MELANESIAN SPEARHEADS GROUP (MSG) GUNA
MENDUKUNG KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA**

